



MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

MERAWAT AMANAT DEMOKRASI

Pemerintah menjamin hak pilih setiap warga negara Indonesia.
Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran demokrasi secara efektif.
Selain menyukseskan Pemilu, anggaran demokrasi diharapkan mampu
memberikan stimulus bagi ekonomi.



Daftar Isi



Edisi April ini mengangkat tema anggaran demokrasi. Untuk menjamin kelancaran perhelatan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Pemilu. Partisipasi dari seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya menjadi hal paling krusial. Kondisi ini kami gambarkan melalui jari tangan yang telah tercelup tinta. Dengan keikutsertaan seluruh masyarakat, maka tujuan penyelenggaraan pemilu bisa tercapai optimal. Selain itu, anggaran yang telah dialokasikan pemerintah tidak terbuang percuma.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Riva Setiara, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Sri Moedji Sampumanto, Budi Sulistiyo. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Ferdian Jati Permana, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadi, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Victorianus M.I. Bimo., **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

14 TOPIK PILIHAN

15 TAGAR

LAPORAN UTAMA

17 Memilih Masa Depan Indonesia

20 Infografis

22 Anggaran Pesta Demokrasi

25 Tahun Pemilu, Ekonomi Melaju

27 Kupas Anggaran Demokrasi

TRIVIA

29 Tahukah Kamu?

WAWANCARA

30 Sigap Mengolah Limbah

FIGUR

34 Perjuangkan Keyakinan

OPINI

37 Enterprise Architecture Dukung Transformasi Digital Kemenkeu

OPINI

40 Survei MOFIN dan The New Thinking of Working

POTRET KANTOR

42 KPPN Palu: Hikmah dan Berkah di Balik Musibah

PROFESI

44 Laku Lelaki Kimia

REGULASI

46 Perbaikan Ketentuan Ekspor untuk Gairahkan Industri Kelapa Sawit

GENERASI EMAS

48 Sang Visioner Pembiayaan Mikro

BUGAR

51 Karies Gigi Picu Endocarditis

RENUNGAN

52 Agar Hidup Tak Sekadar Hidup

BUKU

53 Refleksi Perbaikan Diri

LOKAL

54 Kertha Gosa, Pengadilan di Zaman Kerajaan Bali

FINANSIAL

56 Mengatur Keuangan Akhir Bulan

Eksiskan Idemu di **Jurnal BPPK**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

CALL FOR PAPERS 2019
TEMA : EKONOMI & KEUANGAN NEGARA
jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk

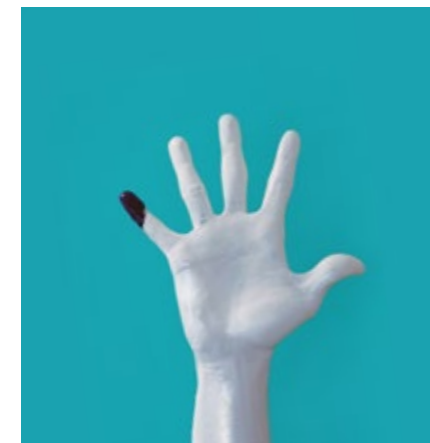
Dari Lapangan Banteng

Pesta Demokrasi Untuk Rakyat

Sebagai negara demokrasi, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi pada 17 April 2019. Sebuah pesta yang berbentuk pemilihan umum ini adalah kontribusi nyata dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebuah kontribusi politik dari masyarakat dimana rakyat memilih para wakilnya yang kemudian akan duduk di parlemen dan sekaligus juga memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin pemerintahan.

Berdasarkan data dari KPU, sekitar 190 juta orang terdaftar sebagai pemilih yang akan memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPRD Propinsi dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten. Para calon legislator tersebut berasal dari 16 partai nasional ditambah empat partai daerah yang khusus berkompetisi di Aceh.

Layaknya sebuah pesta, tentu dibutuhkan biaya agar penyelenggaraannya dapat berjalan sukses. Penyelenggaraan pemilihan calon legislatif dan calon presiden yang waktunya dijadikan secara bersamaan sangat memberikan efiseinsi dari sisi biaya. Pengadaan kotak suara dan bilik suara adalah contohnya, dengan menggunakan kotak dan bilik suara yang sama, akan terjadi banyak penghematan. Contoh penggunaan biaya lainnya adalah untuk pengadaan kertas suara, tinta



sebagai bukti telah melakukan pemilihan, honor panitia dan saksi penghitungan suara, pengamanan Pemilu dan lain-lainnya.

Walaupun telah terjadi penghematan, total biaya yang dibutuhkan untuk Pemilu 2019 kali ini tetap lebih mahal bila dibandingkan Pemilu 2014. Menurut penghitungan dari Direktorat Jenderal Anggaran, alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 (realisasi dan pagu) membutuhkan biaya Rp25,59 triliun. Sedangkan pada Pemilu 2014 telah dikeluarkan total biaya sebesar Rp.15,62 triliun. Di lain sisi, pesta demokrasi ini juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Kampanye bagi calon anggota legislatif dan calon presiden dapat dipastikan akan mengeluarkan banyak biaya untuk biaya iklan, ongkos

atribut kampanye, *event organizer*, konsultan politik dan lain-lain.

Salah satu faktor yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah akuntabilitas dari biaya-biaya yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah maupun oleh partai politik. Sumber dana pemerintah yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, harus jelas pertanggungjawabannya. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus dapat menjadi teladan yang baik bagi tegaknya integritas dan profesionalisme dari kegiatan terbesar di Indonesia tahun 2019 ini. Demikian juga partai politik, sumber pendanaan untuk kepentingan Pemilu harus transparan sehingga dapat mencegah adanya konflik kepentingan.

Yang lebih penting lagi adalah partisipasi seluruh rakyat yang sudah masuk dalam kategori pemilih. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memilih presiden dan legislator yang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Apabila kita tidak melakukan pemilihan, maka biaya yang sudah dikeluarkan akan menjadi sia-sia. Kesempatan untuk berkontribusi politik sebagai rakyat dalam sistem demokrasi juga akan hilang.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi



SISA PILU DI SISI PALU

Pangkalan Sarana dan Operasi (PSO) Bea Cukai Pantoloan menjadi saksi bisu bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Kota Palu akhir tahun 2018. Pasca bencana tersebut, Kementerian Keuangan melalui kantor vertikal di Kota Palu tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, Kota Palu sudah mulai bangkit dan melakukan pembangunan

Foto
Resha Aditya
Pratama

PIKAT ADAT PENYENGAT

Festival Pulau Penyengat merupakan event tahunan yang diselenggarakan di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Acara yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 – 18 Februari 2019 ini, diisi dengan bermacam lomba, antara lain Lomba Gurindam XII, Lomba Berbalas Pantun, Lomba Dangkong dll. Di pulau ini terdapat banyak bangunan peninggalan sejarah, antara lain Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam para raja, dan benteng pertahanan di Bukit Kursi.

Foto dan
teks
Edi Santoso





06/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

MRT Akan Meningkatkan Ekonomi dan SDM Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap masyarakat dapat menikmati sebuah transportasi umum yang nyaman dan efisien dengan segera beroperasinya Mass Rapid Transit (MRT). Selain dampak ekonomi yang akan muncul, dampak terhadap kualitas SDM Indonesia juga diharapkan akan turut meningkat. “(MRT) banyak merekrut para profesional Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk kembali ke Indonesia, ada dari operasional dan konstruksi. Beliau-beliau bekerja di luar negeri mendapatkan gaji yang baik namun merasa terpinggил kembali ke Indonesia untuk membangun sistem MRT ini,” jelas Menkeu pada kunjungan uji coba MRT Jakarta, Kamis (06/03). Di stasiun MRT Senayan, Menkeu bercerita kepada awak media mengenai pengelolaan SDM, aspek kebersihan, keamanan, serta sirkulasi jalur para penumpang. Ia mengatakan cara pengelolaan ini akan mampu mentransformasikan Jakarta menjadi masyarakat yang modern. “(MRT) akan banyak sekali mengurangi polusi udara, mengurangi kemacetan, sampai mengubah kultur masyarakat Indonesia untuk berjalan, menggunakan transportasi umum dan ikut memeliharanya. Jakarta benar-benar masuk dalam era sebagai

kota modern,” ujarnya. Di samping itu, 80% jajaran perusahaan MRT Jakarta yang diduduki oleh generasi milenial diharapkan akan menjadi sebuah proses perubahan demografi yang menggembirakan. Generasi muda akan menjadi penerus berbagai program pembangunan dan mereka secara bertahap akan menjadi generasi yang memimpin dan mengurus republik ini, ujar Menkeu.

Menkeu juga mengapresiasi dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dengan hadirnya transportasi umum Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. “Dari 13 stasiun (Bundaran HI hingga Lebak Bulus), di setiap pemberhentian, perusahaan swasta ingin stasiun diberi nama perusahaan. Berarti menimbulkan penerimaan. Properti di dalamnya sudah mulai disewa dan akan memunculkan kegiatan ekonomi,” tukas Menkeu. Menkeu menyambut gembira bahwa persiapan launching MRT berjalan sangat baik. “Kita akan menggunakan platform MRT untuk mengembangkan MRT lebih hingga ke fasilitas konektivitas dengan moda transportasi lain. Dengan semakin terintegrasi, maka masyarakat akan merasa semakin efisien apabila memakai transportasi umum,” pungkias Menkeu.

26/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Inovasi Terknologi dan Kolaborasi untuk BLU

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) turut mendorong perbaikan proses bisnis BLU melalui implementasi inovasi teknologi. Topik ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum (Rakornas BLU) tahun 2019 yang mengusung Tema “Inovasi Teknologi dan Kolaborasi BLU untuk Pelayanan Lebih Baik” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, pada Selasa (26/02). Acara ini dihari oleh beberapa Menteri terkait dan para pejabat teknis dalam pengelolaan BLU, serta para pimpinan BLU. “Saya berharap dengan rapat koordinasi ini, para BLU yang berbeda-beda rumpunnya bisa saling melihat. Jangan hanya yang pendidikan belajar dari BLU pendidikan. Mungkin bahkan idenya bisa dapat dari yang lain di bidang teknologi, di bidang perhubungan, di bidang kesehatan mereka semua bisa saling melihat dan belajar,” harap Menkeu terkait dengan sinergi antar BLU.



27/02

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Peresmian National Export Dashboard

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED) menyelenggarakan Peresmian National Export Dashboard (NED) di Kantor Pusat LPEI SCBD Jakarta pada Rabu (27/02). NED merupakan pusat informasi *web-based* yang menyediakan antara lain Industry Reports and Forecasts, Trade Data and Analysis, Market Info, Country Info, Trade Balance, Country Risk, Export Commodity, Country Economic Forecasts serta Trending Issues. “Kita tentu welcome dan sangat senang bahwa ada inisiatif untuk terus membangun suatu kultur kemampuan untuk mengolah data atau dalam hal ini mengelola informasi dan data di dalam rangka untuk terus mampu memperbaiki policy kita berdasarkan evidence,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan arahannya sekaligus meresmikan NED pada acara tersebut.

01/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

UMi Juga Gerakkan Ekonomi Gorontalo

Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan program kredit Ultra Mikro (UMi) pada tahun 2017. Dana UMi pada awalnya yang dikelola hanya sebesar Rp1,5 triliun hingga saat ini menjadi Rp7 triliun. Dari total dana Rp7 triliun yang dikelola PIP, Rp2 triliun telah disalurkan kepada para pengusaha mikro se-Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada sambutannya pada acara Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk warga Provinsi Gorontalo di Pasar Sentral Gorontalo Jumat, (01/03). “Saat ini, dari Rp7 triliun yang sudah dikumpulkan oleh PIP, disalurkan melalui berbagai lembaga-lembaga yang memang memiliki kapasitas untuk menyalurkan dana ultra mikro, yaitu PT Pegadaian yang hari ini akan melakukan akad kredit, PNM, serta Bahana Arta Ventura,” jelas Menkeu.





03/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Hackathon 2019 Dorong Generasi Muda Peduli APBN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengundang para calon pemimpin masa depan Indonesia untuk ikut berkompetisi dalam Kompetisi Hackathon 2019 yang diadakan di Aula Mezzanine, Kemenkeu pada Jum'at-Minggu (1-3/03). Dalam kompetisi tersebut, anak muda Indonesia ditantang untuk bekerja sama, membuat desain, konsep komunikasi, dan platform yang edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran milenial Indonesia tentang bagaimana negara mengelola kebijakan fiskal. Peserta kompetisi adalah 39 anak muda terpilih dari seluruh penjuru negeri yang berhasil menyisihkan kurang lebih 3 ribu pendaftar. Setelah itu, peserta yang terbagi dalam 13 tim langsung menyusun project yang ingin mereka kerjakan, tentunya dengan bimbingan para mentor. "Kita semua terus menerus melakukan inovasi how to communicate, to inform, to educate lapisan masyarakat di Indonesia, mahasiswa, SMA, sampai kepada kelompok profesional dan bahkan masyarakat luas," jelas Menteri Keuangan (Menkeu).

03/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Spectaxcular 2019 Tingkatkan Kesadaran Bayar Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia yang serentak mengadakan Spectaxcular 2019 untuk memenuhi tugas konstitusi dalam mengingatkan, mengkomunikasikan, mendidik serta memotivasi seluruh masyarakat Indonesia agar sadar membayar pajak. "Semua jajaran pajak tetap semangat bekerja, kalian hebat, dan saya salut kepada kalian. Tahun ini kita juga akan mengumpulkan angka yang untuk pajak saja merupakan angka yang cukup signifikan, jadi kita semuanya akan melakukan dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Saya sangat berterimakasih di DJP semenjak 2012 sudah mulai melakukan inisiatif untuk menggunakan e-filing dan bahkan e-billing untuk membayarnya, jadi bahkan tidak perlu datang ke kantor pajak," ujarnya pada acara Spectaxcular 2019 di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Minggu, (03/03).

05/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Zakat Agar Dapat Dikelola Seperti Pajak

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo berharap agar pengelolaan zakat diterapkan seperti pajak. Apabila pajak ada NPWP maka zakat ada NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat). "Bagaimana pengelolaan zakat itu seperti pajak. Kalau di pajak itu ada NPWP maka tidak ada jeleknya kalau ada NPWZ," ungkapnya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2019 di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah (05/03). Pada kesempatan yang diselenggarakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) bertema Mewujudkan Sistem Pengumpulan Zakat seperti Pajak tersebut, Wamenkeu menjelaskan dengan adanya NPWZ maka pembayaran zakat bersifat mengikat dan terukur karena menggunakan data teknologi informasi. Wamenkeu berharap dengan NPWZ zakat bisa memberikan suatu tempat untuk sumber pembiayaan secara nasional.



15/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

LPDP Ajak Alumni Berkontribusi Bangun Negeri

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyelenggarakan rangkaian acara Sarasehan LPDP 2019 bertema "Kembali untuk Negeri" pada 15-16 Maret 2019. Melalui acara ini, LPDP berharap para alumni yang telah menjalani pendidikan, bersama-sama berbakti dan memberikan kontribusinya untuk membangun negeri di segala bidang. "Rangkaian acara ini akan dilakukan kolaborasi antara para alumni melalui Ikatan Alumni LPDP yang disebut dengan Mata Garuda. Kolaborasi ini terwujud dalam banyak kegiatan kegiatan alumni baik di daerah dalam bentuk kegiatan sosial pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dan berbagai sektor maupun kegiatan kegiatan pendampingan di pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing," jelas Menkeu dalam acara puncak Sarasehan LPDP 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta pada Jum'at (15/03).

19/03

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Pahami Konteks dan Perubahan Adalah Kunci Menuju Negara Maju

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menginternalisasi visi, misi, norma, dan nilai Kemenkeu dalam setiap sisi kehidupan. Salah satu caranya adalah memahami konteks dan perubahan yang terus terjadi. Hal ini disampaikan Menkeu pada acara Workshop Duta Transformasi Kemenkeu dengan tema "Executive Present" di Aula Juanda, Gedung Juanda I Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/03). "Lebih dari 192 negara semuanya memiliki aspirasi menjadi negara maju high-income country, tidak semua berhasil mencapainya. Yang betul-betul menjadi high-income countries only a few. Anda harus mampu meletakkan dalam konteksnya. Jika kita hanya sekedar bekerja, Anda tidak tahu konteksnya, maka Anda kehilangan the real mission of the institution," tegas Menkeu di depan para pegawai yang bertugas sebagai Agen Transformasi di lingkungan Kemenkeu.



Wacana Skema Pajak Emisi

Usulan pemerintah terkait perubahan skema tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dalam rapat konsultasi bersama Komisi XI DPR RI menjadi topik baru yang mencuat. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan mengenai wacana pelonggaran kebijakan yang mencakup tiga aspek, yakni dasar penghitungan pengenaan PPnBM, reformulasi pengelompokan kendaraan penumpang, dan perluasan insentif untuk kendaraan beremisi rendah.

Lebih jauh, Menkeu menjelaskan skema perubahan dalam PPnBM kendaraan bermotor roda empat. Untuk dasar pengenaan pajak yang saat ini aturannya berdasarkan kapasitas mesin diusulkan berubah

menjadi berdasarkan konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi CO2. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta mendorong industri otomotif dalam negeri agar memproduksi kendaraan yang lebih rendah emisi termasuk mobil listrik.

Mendukung kebijakan tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meyakini usulan ini akan menjadi stimulus bagi industri otomotif dalam negeri, sehingga akan mampu mengungguli negara kompetitor seperti Thailand. Hal itu diperkuat dengan berbagai perjanjian dagang yang telah ditandatangani. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengatakan secara garis besar relaksasi tarif

pajak tersebut mengikuti tren dunia internasional. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center for Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pengenaan cukai atas kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi karbon lebih sesuai dengan teori, mudah diadministrasikan, dan tepat sasaran, dibanding pemberian insentif berupa perubahan skema PPnBM. Sementara itu, Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto, mengharapkan agar keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan penjualan produk semata, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap lokalisasi produk dalam negeri.

TOPIK LAIN

Rilis BPS pada akhir Februari menyebutkan defisit neraca perdagangan Januari 2019 mencapai US\$1,16 miliar, dengan nilai impor sebesar US\$15,03 miliar dan ekspor sebesar US\$13,86 miliar. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai defisit neraca perdagangan ini masih turut disumbang oleh perang dagang China-Amerika Serikat.

Selanjutnya, Menkeu dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum (Rakornas BLU) tahun 2019 mengingatkan beberapa hal terkait BLU, yakni terkait Rencana kerja sama fleksibilitas likuiditas antar BLU, sinergi antar BLU yang mengakomodasi BLU yang mengalami kesulitan likuiditas, serta keutamaan BLU agar berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan mencari keuntungan.

Topik deflasi sebesar 0,08 persen (mtm) Februari 2019 juga menjadi topik hangat. Deputi Kepala BPS, Yunita Rustanti, menjelaskan deflasi pada bulan tersebut disebabkan oleh turunnya harga sejumlah bahan makanan. Data tersebut didukung oleh pernyataan Menko Bidang Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia.

Teks Abdul Aziz

Setiap bulan Media Keuangan mengajak partisipasi pembaca untuk memberikan opini lewat kuis di kanal instagram @majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuri. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi.

- www.kemenkeu.go.id
- KemenkeuRI
- @KemenkeuRI
- KemenkeuRI
- KemenkeuRI
- majalahmediakeuangan



@majalahmediakeuangan Sampaikan secara singkat opini konstruktif Anda terkait wacana perubahan skema PPnBM Kendaraan bermotor



Like

Reply



@bongsuocu13 "Saya setuju apabila perhitungan PPnBM kendaraan bermotor mengacu pada kadar emisi....dengan pajak yang makin kecil, dapat menstimulus pelaku usaha untuk mengubah produksi kendaraan dalam negeri menjadi rendah emisi..."



@bagaspws "...dalam ekonomi mkro terdapat istilah eksternalitas negatif (efek samping negatif yang diderita pihak yang tidak terlibat tindakan ekonomi tersebut...Pajak emisi tepat dialokasikan untuk mensubsidi dana kesehatan seperti BPJS..."



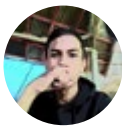
@zidniam "...rencana skema PPnBM kendaraan bermotor berdasarkan konsumsi bahan bakar dan tingkat emisi CO2 memicu industri mpbil ramah lingkungan dan impor BBM..."



@KemenkeuRI Tulis harapanmu akan penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai momen bersejarah penentu arah dan kondisi Bangsa & Negara ke depannya.



@alexfiterob Yang terpilih haruslah bisa mengedepankan kemajuan Bangsa Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Negara ini lahir atas dasar PERJUANGAN, Siapa pun yg terpilih, mereka hanya meneruskan.



@Nazar_RF Pemilu 2019 adalah hak politik warga negara untuk ikut menentukan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi maka dari itu setiap Pemilih harus tau betul visi misi yang benar-benar pro kepada rakyat



@Innew07 Semoga pemilu 2019 menjadi pemilu berkualitas, dibarengi dengan pengawasan baik. Karena pelaksanaan pemilu yg baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa



MEMILIH MASA DEPAN INDONESIA

Indonesia untuk pertama kalinya menggelar pemilu serentak guna memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota legislatif di parlemen untuk periode 2019–2024. Dana yang dianggarkan untuk penyelenggaraan pemilu 2019 mencapai Rp25,59 triliun. Jumlah ini belum termasuk anggaran pengawasan dan kegiatan pendukung pemilu. Besaran anggaran tersebut merupakan ongkos yang perlu dibayar, guna menyukkseskan momen paling menentukan bagi bangsa Indonesia pada lima tahun ke depan.

Sudah di depan mata

Belakangan ini, kibaran spanduk, bendera, hingga baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden semakin mudah dijumpai. Begitupun dengan gambar calon anggota legislatif dari beragam partai peserta pemilu. Tidak mengherankan. Sebab sebentar lagi, perhelatan demokrasi lima tahunan kembali digelar. Momen bersejarah yang paling ditunggu-tunggu.

Sebagaimana diketahui, tujuan akhir demokrasi tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya, untuk memastikan perhelatan demokrasi berjalan lancar, pemerintah telah menganggarkan dana pemilu sejak jauh-jauh hari. Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengungkapkan, proses penganggaran untuk Pemilu 2019 telah dimulai sejak 2017 lalu.

“Sama (seperti periode-periode sebelumnya). Paling tidak penganggarannya harus (dilakukan selama) 3 tahun. Pada tahun pertama masih persiapan, tahun kedua ituantisipasi untuk penguatan, tahun ketiga tahun pelaksanannya. Biasanya tahun ketiga yang paling tinggi anggarannya,” jelas Askolani.

Seorang ibu melihat daftar calon anggota legislatif.

Foto
Arief
Kuswanadji



Poster ajakan untuk berpartisipasi dalam Pemilu bersih.

Foto Arief Kuswanadji

Mekanisme penganggaran tersebut, mengikuti aturan yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara maupun UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diakui Askolani, pelaksanaan pemilu serentak yang dilakukan pada tahun ini, memberikan tensi yang cukup tinggi. “Sebab ini pertama kali, kita melaksanakan pemilu sekaligus,” ujarnya.

Mempersiapkan momen bersejarah

Kepala Biro Perencanaan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sumariyandono kepada Media Keuangan mengungkapkan, disamping penyusunan perencanaan program anggaran untuk 2018 dan 2019, terdapat sejumlah persiapan lain yang dilakukan KPU. Persiapan tersebut meliputi sejumlah persiapan logistik, pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil), hingga penetapan calon anggota legislatif beserta calon presiden dan wakil presiden.

Untuk Pemilu 2019 ini, persiapan logistik yang dilakukan KPU diantaranya kegiatan pengadaan untuk 4 juta lebih kotak suara, 2 juta lebih bilik suara, 75 juta lebih keping segel, 1,6 juta lebih botol tinta, 939 ribu lebih surat suara, serta 561 ribu lebih formulir. Total kebutuhan anggaran penyediaan logistik tersebut tidak kurang dari Rp1,83 triliun.

Selanjutnya, untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU melibatkan sejumlah pihak terkait. Anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan ini adalah sebesar Rp300 miliar. Diakui Sumariyandono, alokasi anggaran paling besar digunakan untuk membiayai kegiatan badan adhoc yang dibentuk KPU. Jumlahnya mencapai 63,6 persen dari pagu total anggaran KPU.

“Misalnya saja untuk tahun anggaran 2019 ini, jumlahnya mencapai Rp10,04 triliun. (Anggaran) ini untuk membiayai kegiatan operasional dan honorarium bagi sekitar 7.201 panitia

pemilihan kecamatan (PPK), 83.404 panitia pemungutan suara (PPS), serta 810.253 tempat pemungutan suara (TPS). Untuk kebutuhan untuk para pemilih di luar negeri, kebutuhannya sebanyak 783 TPSLN, 2.345 TPSLN-KSK, serta 429 TPSLN-Pos,” sebutnya.

Pada tahap persiapan ini, KPU juga menggelar kegiatan edukasi pemilu kepada masyarakat. Kegiatan edukasi tersebut antara lain kegiatan pendidikan pemilih serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sumariyandono mengaku, kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat lebih melek informasi mengenai pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pada kegiatan sosialisasi ini, KPU menggandeng sejumlah relawan demokrasi untuk ikut ambil bagian.

Tidak ketinggalan, bagi para peserta pemilu, KPU memfasilitasi kegiatan kampanye bagi para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebanyak tiga kali. Fasilitas tersebut berupa iklan dan alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk, dan lainnya. Di sisi lain, KPU juga melakukan kegiatan audit terkait dana kampanye para peserta pemilu agar transparan dan akuntabel.

Pada tahapan berikutnya, terdapat juga kebutuhan anggaran untuk kegiatan rekapitulasi dan perhitungan suara.

Kegiatan ini dilakukan pada hari pelaksanaan pemilu. Diakui Sumariyandono, anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

Naik, tapi lebih efisien

Dibandingkan pemilu 2014, Askolani menuturkan anggaran Pemilu 2019 mengalami kenaikan. Tercatat, anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 adalah Rp25,59 triliun, atau naik 61 persen dibandingkan anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp15,62 triliun. Selanjutnya, anggaran pengawasan pemilu naik dari Rp3,67 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp4,85 triliun pada Pemilu 2019. Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019.

Askolani menyampaikan terdapat dua faktor utama kenaikan anggaran pemilu ini. Pertama, adanya pemekaran daerah. “KPU Provinsi jumlahnya bertambah satu ya, dari 33 sekarang jadi 34. Kemudian untuk KPU kabupaten, itu bertambah 17 KPU Kabupaten dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota,” terangnya.

Hal ini selanjutnya berdampak pula pada kenaikan jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, hingga KPPS. “Inilah yang menyebabkan biaya bertambah. Karena memang penyelenggaranya dan lembaganya juga bertambah,” ungkap Askolani.

Sebab kedua, adanya kenaikan honorarium bagi para penyelenggara pemilu, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Termasuk juga panitia yang ada di luar negeri. “Kita hitung sesuai usulan KPU untuk mengadopsi dampak dari inflasi,” katanya.

Sumariyandono menuturkan, meski mengalami peningkatan anggaran yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, pelaksanaan pemilu serentak tahun ini juga mampu menghemat anggaran dalam jumlah yang tidak kalah signifikan. Untuk biaya honor petugas pemilu, misalnya, efisiensi anggaran mencapai 50 persen. Selain itu, KPU juga bisa memangkas biaya pemutakhiran data pemilih karena hanya perlu dilakukan sebanyak satu kali pada awal persiapan pemilu.

Sebagai informasi, praktik pemilu serentak telah dilakukan di sejumlah negara di dunia. Sumariyandono menyebutkan, Amerika Serikat menjadi salah satu contohnya. “Gubernur atau kepala daerah di AS dipilih bersamaan dengan pemilihan presiden serta para senator,” ungkapnya. Selain itu, dia menambahkan, pemilu serentak juga dilaksanakan oleh 12 negara dari total 18 negara di kawasan Amerika Latin. Begitupun dengan Korea Selatan yang sistem pemilihannya

menggunakan Sistem Demokrasi Presidensial.

Upaya KPU tekan biaya

Upaya mengefisiensikan anggaran oleh KPU juga dilakukan dalam beberapa aspek. Dalam hal pengadaan logistik, misalnya, KPU telah melaksanakannya secara elektronik melalui Katalog Nasional. Upaya ini diakui Sumariyandono mampu menghemat anggaran yang cukup besar dari pagu yang tersedia. “Tahun Anggaran 2018, pengadaan logistik dapat menghemat 50,57 persen atau setara dengan Rp483 miliar, sedangkan Tahun Anggaran 2019, efisiensi mencapai 31,4 persen atau setara dengan Rp355 miliar,” rincinya.

Tidak sampai di situ, KPU juga mengupayakan terobosan baru berupa penggunaan kotak suara dari bahan karton yang kedap air. Dari upaya tersebut, biaya pengadaan kotak suara diketahui bisa dipangkas hingga 70 persen. KPU memastikan bahwa kotak suara tersebut telah lulus uji kekuatan maupun kelayakan penggunaan.

Upaya lain KPU dalam menekan biaya salah satunya dari sisi fasilitas kampanye bagi para calon anggota parlemen. Dari sepuluh kali fasilitas kampanye yang diperbolehkan Undang-Undang, KPU membatasi pemberian fasilitas sebanyak tiga kali saja.

Pemilu bangun ekonomi

Perhelatan demokrasi Indonesia yang terjadi lima tahunan sekali bukan hanya memberi dampak bagi aspek sosial politik masyarakat, melainkan juga bagi perekonomian. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM UI), Teguh Dartanto menuturkan jumlah

peredaran uang yang terjadi pada 2019 akibat kegiatan politik dan kampanye diprediksi sama dengan periode sebelumnya, yaitu sebesar Rp55 triliun. Hal ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada periode 2014 lalu. Teguh beralasan, pemilu serentak menjadi sebab ongkos politik yang dikeluarkan para peserta pemilu bisa lebih ditekan.

Sementara itu, sumbangsih Pemilu 2019 bagi perekonomian Indonesia diprediksi berada pada kisaran 0,2–0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, hal ini hanya berlangsung pada kuartal sebelum dan sesudah pemilu.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede lebih berhati-hati dalam memprediksi dampak pemilu bagi pertumbuhan ekonomi, “Jika menggunakan pendekatan konservatif, pemilu 2019 dapat memberikan kontribusi sebesar 0,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan angka realisasi tahun 2014,” jelasnya.

Josua melanjutkan, pemilu 2019 berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan penjualan ritel pada kuartal pertama 2019 dibandingkan kuartal sebelumnya. Padahal, jika melihat data historis penjualan ritel, pertumbuhan penjualan ritel sebelumnya cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2013. “Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemilu 2019 dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap konsumsi,” ungkapnya. Meski demikian, Josua menambahkan, dampak peningkatan konsumsi terhadap laju pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada neraca dagang dan pembentukan modal di kuartal pertama tahun 2019.

Teks Farida Rosadi

PROSPEK PEMILU INDONESIA

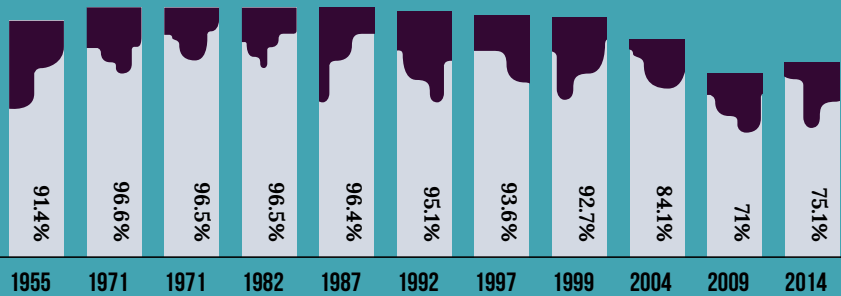
Pemilihan umum tahun 2019 akan dilaksanakan secara serentak yaitu untuk memilih baik itu calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Menjelang pelaksanaan pemilu, pemerintah terus berusaha memperbaiki mekanisme dan pembiayaan yang diperlukan agar proses politik dan demokrasi di negeri ini berjalan lancar, sukses, dan aman.



PEMILU DI TANAH AIR SUDAH DILAKSANAKAN SEBANYAK 11 KALI



TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU LEGISLATIF DARI MASA KE MASA



Sumber: KPU dalam BPS Statistik Politik 2015

PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 DAN 2019



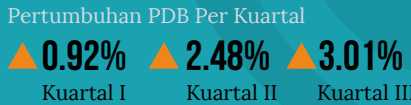
ALOKASI ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2019



Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Anggaran Pemilu Yang Dikururkan Diharapkan Dapat Mendorong Ekonomi.

Sebagai Contoh Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Yang Diselenggarakan Pada Bulan Juli 2014 Memberikan Perbaikan Indikator Ekonomi Seperti:



Sumber: BPS, pertumbuhan PDB berdasarkan pengeluaran

PERSIAPAN LOGISTIK YANG DILAKUKAN KPU UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILU 2019



Sumber: Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU



ANGGARAN PESTA DEMOKRASI



Suasana saat pesta demokrasi.

Foto Arief Kuswanadji

Tepuk sorak bergemuruh di salah satu aula hotel terkenal di sekitar Jakarta Selatan. Tak lama, sang moderator mengangkat tinggi tangannya sebagai tanda kepada para penonton untuk segera kembali tenang. Acara debat pilpres pun berlanjut.

Semenjak debat pertama digelar pada tanggal 17 Januari yang lalu, kini masyarakat Indonesia tinggal menghitung hari untuk menggunakan hak pilihnya. Tak hanya itu, pesta demokrasi tahun ini pun memiliki hal yang baru. Untuk pertama kalinya, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden diselenggarakan berbarengan dengan Pemilu Legislatif. Dampaknya, untuk menyukseskan pesta lima tahunan tersebut pemerintah perlu menyediakan anggaran demokrasi.

Sejalan dengan Nota Keuangan dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian Keuangan

berkomitmen untuk terus menjaga tingkat keyakinan masyarakat agar tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha, dan investasi tetap meningkat sejalan dengan berlangsungnya Pemilihan Umum, baik legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penyelesaian pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan reformasi kebijakan yang merupakan prioritas utama terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi agar dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi.

Menyuji anggaran demokrasi

Untuk menyiapkan anggaran Pemilu 2019, proses penganggarannya telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA. Anggaran Pemilu telah diperhitungkan sejak penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran.

“Ini proses yang berulang 5 tahun sekali. Kalau kita bandingkan dengan periode-periode yang lalu, 5 tahun sebelumnya dan sebelumnya lagi itu sama. Kalau kita lihat ini sudah sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara dan tentunya sesuai dengan mekanisme Undang-Undang APBN yang berlaku tiap tahun,” jelas Direktur Jenderal Anggaran, Askolani.

Penyusunan anggaran untuk tahapan Pemilu juga melalui pendekatan penyusunan anggaran yang telah ditetapkan yaitu pendekatan Penganggaran Terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), serta memperhatikan Tahapan Pemilu sebagaimana amanat undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Polanya juga sama bahwa Pemilu tiap 5 tahun paling tidak biasanya penganggarannya harus 3 tahun. Jadi kita bandingkan dengan waktu-waktu yang lalu memang pada tahun pertama masih persiapan, tahun kedua itu yang kemudian juga antisipasi untuk penguatan. Dan tahun ketiga hari H-nya,” ungkapny.

Senada dengan Askolani, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN, Dwi Pudjiastuti Handayani atau disapa Ani, mengungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat beberapa tahapan yang berbeda dengan Pemilu tahun 2014. Selain digabungnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif, jumlah pemilih juga mengalami pertambahan

yang berarti menambah jumlah surat suara yang dicetak. Selain itu, jumlah surat suara untuk Pemilu 2019 terdiri dari lima jenis, yakni surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tak ayal, anggaran total pun bertambah untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Selain faktor di atas, meningkatnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi salah satu sebab bertambahnya anggaran Pemilu. Hal ini disebabkan jumlah pemilih per TPS di Pemilu 2019 dibatasi hanya 300 pemilih per TPS, sedangkan jumlah pemilih per TPS di Pemilu 2014 sebanyak 500 pemilih per TPS. Tercatat, jumlah pemilih di Pilpres 2014 adalah sebanyak 190.307.134 pemilih, dengan jumlah TPS sebanyak 545.803 TPS. Sedangkan jumlah pemilih pada Pemilu 2019 adalah 192.828.520 pemilih, dengan 810.283 TPS.

Di sisi lain, kenaikan anggaran juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah badan penyelenggara Pemilu (Permanan dan Ad-Hoc), penyesuaian besaran honorarium anggota badan adhoc yang rata-rata meningkat sebesar 68 persen, serta inflasi selama 5 tahun yang berpengaruh terhadap harga barang dan jasa kebutuhan Pemilu.

“Jumlah pemilih kalau bertambah pasti juga akan nambah kartu suara. Kemudian dengan bergabungnya Pemilu ini pasti ini juga akan berpengaruh kepada pembentukan TPS. Karena kalau dulu pilihannya hanya untuk DPR saja, atau Presiden saja, sekarang lebih banyak,” ungkap Ani.

Ekonomi Pemilu

Kesuksesan agenda Pemilu di tahun 2019 juga memiliki risiko dan tantangan bagi ekonomi, terutama dari mesin pertumbuhan investasi. Sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dampak yang muncul, pemerintah menitikberatkan pada stabilitas politik dan ekonomi untuk menjaga persepsi dan iklim investasi yang baik. Untuk menciptakan Pemilu yang aman, tertib, serta terciptanya perlindungan masyarakat, pengamanan Pemilu akan diselenggarakan bersama di tiga puluh empat daerah oleh personil Polri, TNI, serta Satpol PP dan Satlinmas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Terkait dengan belanja pemerintah untuk Pemilu 2019, Ani menjelaskan bahwa anggaran APBN 2019 yang dialokasikan untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2019 terbagi ke dalam tiga tahun anggaran. Untuk 2017, realisasi anggaran persiapan Pemilu 2019 mencapai Rp465,7 miliar, sedangkan realisasi untuk 2018 mencapai Rp9,33 triliun. Sementara itu, untuk APBN 2019 dialokasikan pagu anggaran Pemilu sebesar Rp23,94 triliun yang terdiri dari anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp15,79 triliun, anggaran pengawasan sebesar Rp4,86 triliun, dan anggaran pendukung Pemilu sebesar Rp3,29 triliun.

Dari sisi penyelenggaraan pemilu saja atau tanpa anggaran pengawasan dan pendukung, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp465,7 miliar (APBN 2017), Rp9,33 triliun (APBN 2018), dan pagu anggaran Rp Rp15,79 triliun untuk APBN 2019. Sehingga,

total realisasi dan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 selama tiga tahun terakumulasi sebesar Rp25,59 triliun.

Mendukung hal tersebut, *lead economist* Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan beberapa dampak ekonomi dari adanya Pemilu serentak 2019. Menurutnya, Pemilu serentak akan memberikan dampak politik yang signifikan, seperti mendorong tingkat partisipasi politik dalam Pemilu, khususnya untuk Pemilu legislatif yang pada umumnya rendah. Dalam jangka pendek, ada dua dampak ekonomi dari keputusan pemerintah untuk mengadakan Pemilu serentak.

Pertama, penghematan anggaran penyelenggaraan Pemilu karena dilaksanakan satu kali, baik APBN maupun non-APBN, khususnya untuk operasional pada hari H seperti biaya pengadaan tempat pemungutan, anggota penyelenggara maupun petugas keamanan. Namun, biaya operasional untuk pengamanan juga dapat meningkat apabila partisipasi politik dalam Pemilu lebih tinggi dari ekspektasi dikarenakan Pemilu serentak.

Kedua, kegiatan kampanye yang dilakukan calon legislatif dan presiden dapat memicu aktivitas ekonomi, khususnya untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Kampanye akan cenderung fokus untuk menarik suara mayoritas kelas ekonomi menengah ke bawah. “Biaya kampanye per suara untuk masyarakat kelas tersebut relatif lebih rendah. Pembagian sembako, panggung rakyat, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, maupun desa, membutuhkan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan biaya kampanye di daerah perkotaan untuk kelas menengah ke atas. Jumlah peserta Pemilu legislatif juga meningkat di Pemilu 2019 dikarenakan adanya ekspansi otonomi daerah dan meningkatnya jumlah populasi di beberapa daerah. Penambahan jumlah dapil juga dapat meningkatkan pengeluaran kampanye di dapil-dapil baru dan peningkatan penyebaran aktivitas ekonomi,” ungkap Josua.

Di sisi lain, Gunawan Suswantoro, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memberikan pandangan tersendiri. Ia menjelaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013, penyelenggaraan Pemilu serentak akan memberikan efisiensi anggaran, sehingga pembiayaan

penyelenggaraan Pemilu akan lebih menghemat uang negara. Dengan begitu, Gunawan meyakini hal tersebut akan dapat meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana amanat UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan serentak dengan Pemilu legislatif juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat karena persiapan dan pelaksanaannya dilakukan sekali saja.

“Sebagai contoh, kalau sekarang ini kan malah Pemilu itu menjadi lima surat suara. Idealnya sebetulnya harus dipisahkan antara Pemilu nasional dengan Pemilu daerah, harusnya seperti itu. Pemilu nasional itu cukup hanya 3 (tiga) pilihan, yaitu Pilpres, DPR RI dan DPD. Kalau itu, yang kita ambil sebetulnya untuk Pemilu nasional, itu akan sangat efisien,” ungkapnya.

Pengawasan

Terkait dengan tantangan pengawasan Pemilu 2019, Gunawan mengatakan dengan digabungnya pileg dan pilpres tentu akan membutuhkan kerja ekstra karena jumlah jenis surat suara dan pemilih yang bertambah. Untuk itu, UU Nomor 7 tahun 2017 melekatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di dalam struktur Bawaslu. Gakkumdu sendiri beranggotakan Bawaslu, Kepolisian RI, dan Kejaksaan. “Kenapa lembaga

itu harus ada karena di Undang-Undang Pemilu itu banyak sekali diatur tentang pidana Pemilu,” jelasnya.

Untuk Pemilu 2019, Gunawan mengungkapkan peran Bawaslu untuk megawasi setiap tahapan Pemilu sejak tahapan awal pada tahun 2017. “Anggaran-anggaran yang diberikan kepada Bawaslu pertama untuk fungsi mengawasi kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu, terus mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi, kemudian untuk anggaran operasional,” terangnya.

Untuk memberikan kemudahan masyarakat berperan serta mengawasi Pemilu, Bawaslu menyusun platform digital berupa Siwaslu dan Gowaslu. Siwaslu menjadi sistem bersama yang dipakai oleh pengawas TPS, Pengawas Kelurahan, Pengawas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/ Kota dan Bawaslu Propinsi untuk mengumpulkan hasil pemungutan, penghitungan dan proses tahapan Pemilu 2019 sejak masa tenang hingga rekapitulasi suara tingkat nasional.

Sementara itu, aplikasi digital Gowaslu yang terhubung ke Bawaslu juga dibangun khusus bagi masyarakat secara gratis. “Masyarakat boleh men-*download* Gowaslu tersebut gratis. Kalau menemukan pelanggaran silahkan tinggal isi, formatnya ada, terus nanti kita terima, langsung kita *forward*-kan kepada pengawas terdekat untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Teks Abdul Aziz



TAHUN PEMILU, EKONOMI MELAJU

Ratusan kemeja berwarna senada menumpuk setinggi hampir satu meter di lantai salah satu kios Pusat Grosir Senen Jaya, Jakarta Pusat. *Name tag* dan emblem partai politik (parpol) melekat di tiap potongnya. “Kemeja-kemeja ini bernilai Rp45 juta, dipesan salah satu parpol besar beberapa minggu lalu,” jelas Mawardi sang pemilik kios. Ia mengaku masih banyak pesanan atribut kampanye yang sedang ia kerjakan. Kaos, topi, bendera, dan spanduk paling banyak diminati.

Pasar Senen telah puluhan tahun dikenal sebagai salah satu pusat penjualan atribut kampanye. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan tersebut menanggung keuntungan dari penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Selain

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Senen.

Foto
Resha Aditya Pratama



“Sistem kampanye tidak lagi terbuka dan tercetak. Sekarang era digital. Pola 2019 akan terjadi *shifting* ke industri transportasi dan komunikasi.”

Teguh Dartanto
Peneliti Lembaga
Penyelidikan
Ekonomi dan
Masyarakat
Universitas
Indonesia

Pemilu, pesanan pun membanjir jelang Pilkada. Peningkatan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kampanye juga menggairahkan bidang industri lainnya. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teguh Dartanto mengungkapkan pada Pemilu 2014, perputaran dana kampanye banyak berdampak pada industri kertas dan karton (percetakan), industri tekstil, pakaian, dan kulit, industri transportasi dan komunikasi, industri hotel dan restoran, dan jasa lainnya, termasuk periklanan.

Shifting ke Digital

Teguh memperkirakan struktur aktivitas ekonomi terkait Pemilu 2019 akan sedikit berubah dibanding Pemilu 2014. Menurutnya, terjadi *shifting* dari industri kertas dan karton ke industri transportasi dan komunikasi. “Sistem kampanye tidak lagi terbuka dan tercetak. Sekarang era digital. Pola 2019 akan terjadi *shifting* ke industri transportasi dan komunikasi.”

Sejumlah pedagang atribut kampanye di Pusat Grosir Senen Jaya membenarkan terjadi penurunan pesanan atribut kampanye untuk Pemilu 2019. Mawardi yang berdagang di sana sejak 1990-an mengaku penurunan tersebut telah dirasakan pada Pemilu 2014. Masa jaya penjualan atribut kampanye berlangsung saat Pemilu 2004 dan 2009. “Untuk Pemilu 2009, pesanan sudah ramai sejak 2007. Pemilu yang sekarang, pesanan baru berdatangan pada akhir 2018,” ceritanya. Namun, Mawardi menyebut omzet yang ia dapat selama ini masih cukup tinggi. Yeni, pemilik kios di kawasan yang sama, mengutarakan hal serupa. Meskipun pesanan menurun, ia mengatakan masih mendapat keuntungan yang cukup.

Shifting ke dunia digital ini menurut Teguh perlu diantisipasi juga oleh industri

periklanan. Partai politik yang dulu cenderung menggunakan jenis kampanye *above the line* melalui media massa konvensional seperti televisi dan radio, kini beralih ke kampanye *below the line* melalui media sosial. Hal ini memicu penurunan aliran investasi ke industri periklanan.

Pergeseran penggunaan media kampanye politik dibenarkan oleh Kepala Pusat Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Janoe Arijanto. “Kampanye di media sosial dan penggunaan *digital content* menjadi pilihan yang semakin digemari. Masing-masing calon atau partai memaksimalkan seluruh platform digital, tidak hanya untuk menyebarkan pesan, tapi juga untuk membangun interaksi dan mengarahkan agenda politiknya,” terangnya. Janoe menekankan pergeseran ini sudah terjadi sejak 2014 dan semakin intens pada 2019.

Iklan Politik Dibatasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan kegiatan iklan kampanye politik di media massa. Masa penayangan iklan dibatasi selama 21 hari dan berakhir sehari sebelum masa tenang. Menanggapi kondisi itu, Janoe menilai hal tersebut tak berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan industri periklanan di Indonesia lantaran iklan politik tak masuk ke dalam sepuluh besar penyumbang iklan terbesar. Sebagai gambaran, peringkat pertama penyumbang iklan adalah *online service*, kedua perawatan rambut, kemudian diikuti rokok, *facial care*, dan *instant food*. Pada 2018, nilai belanja partai politik di televisi tercatat Rp2,5 triliun (*gross*), sedangkan total belanja iklan di televisi sebesar Rp126 triliun (*gross*).

Selain pembatasan iklan, penyelenggaraan serentak Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dianggap Teguh sebagai salah satu faktor yang menurunkan biaya politik pada Pemilu kali ini. Masa kampanye lebih singkat dan penggunaan platform digital berpengaruh besar terhadap jumlah dana yang dihabiskan partai politik. Namun demikian, pria yang menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Ekonomi UI ini memperkirakan Pemilu 2019 tetap memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Hal senada diungkapkan Dirjen Anggaran Askolani. Tingginya aktivitas partai politik, calon anggota legislatif, serta calon presiden dan calon wakil presiden, dinilainya akan berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi. “Kita yakin itu pasti punya dampak,” tegasnya. Ia mengungkapkan Pemilu 2014 berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 hingga 0,2 persen. Namun, untuk Pemilu 2019, pihaknya belum melakukan kajian.

Teks Reni Saptati D.I.



KUPAS ANGGARAN DEMOKRASI

Pesta demokrasi Indonesia sudah di depan mata. Hal yang berbeda untuk Pemilu tahun ini adalah digabungnya penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Pemilu serentak ini baru dilakukan pertama kali di Indonesia. Bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Pemilu 2019 kali ini? Simak wawancara Media Keuangan bersama Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, mengenai anggaran demokrasi berikut

Bagaimana proses penganggaran untuk kegiatan Pemilu 2019?

Untuk prosesnya sama, tidak ada perubahan. (Sebab) ini proses yang berulang 5 tahun sekali. Mekanismenya mengikuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tentunya Undang-Undang APBN yang berlaku tiap tahun.

Pertama, jika dilihat dari lembaga yang melaksanakannya sama, (yaitu) KPU, Bawaslu, kemudian didukung dari sisi keamanannya (melalui) Polri. Polanya juga sama, bahwa Pemilu tiap 5 tahun, (maka) paling tidak penganggarannya harus (dilakukan selama) 3 tahun. Pada tahun pertama masih persiapan, tahun

kedua ituantisipasi untuk penguatan, tahun ketiga tahun pelaksananya. Itu sama. Biasanya tahun ketiga yang paling tinggi anggarannya. Cuma bedanya tahun ini (pelaksanaan) Pilpres kemudian Pileg jadi satu, sehingga memang tensinya cukup tinggi. Sebab ini pertama kali kita melaksanakan Pemilu sekaligus.

Berapa total anggaran untuk Pemilu 2019?

Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,59 triliun.

Bagaimana rincian alokasi penganggaran untuk Pemilu 2019?

Ini komposisinya bisa beda-beda. Misalnya, untuk anggaran di KPU untuk penyelenggaraan pemilu Rp25,59 triliun. Kalau untuk pengawasan mencapai Rp4,85 T. Kemudian kegiatan pendukung (keamanan, pendidikan dan keterbukaan informasi) bisa mencapai Rp3,29 triliun.

Dibandingkan dengan Pemilu 2014, seperti apa perbandingan alokasi anggaran Pemilu 2019 dalam APBN?

Total untuk penyelenggaraan pemilu pada 2014 mencapai Rp15,62 triliun untuk (penganggaran selama) tiga tahun. Pada 2019 ini mencapai Rp25,59 triliun. (Anggaran) pengawasan dari Rp3,67 triliun (2014) menjadi Rp4,85 triliun (2019) untuk periode (penganggaran) tiga tahun. Selanjutnya, untuk mendukung pemilu dari Rp1,7 triliun (2014), sekarang bisa mencapai Rp3,29 triliun (2019).

Kenapa naik? (Karena) memang kebutuhannya naik. Misalnya, penyelenggara pemilu, itu memang volumenya bertambah. Misal KPU Provinsi, jumlahnya *nambah* 1 Provinsi, dari 33 jadi 34. Kemudian untuk KPU kabupaten bertambah (sebanyak) 17 KPU Kabupaten. Sebab, ada pemekaran (daerah) dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten Kota. Kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertambah sebanyak 207 PPK, dari 6.994 menjadi 7.201 PPK. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertambah (sebanyak) 2000 PPS, dari 81.383 menjadi 83.404 jadi bertambah 2.021 PPS. Nah, yang signifikan bertambah adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari 545.803 KPPS (2014) menjadi 809.500 KPPS (2019), sehingga bertambah 263.697 KPPS. Untuk panitia pemilihan luar negeri tidak berubah (tetap) 130, sedangkan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPS-LN) malah berkurang dari 873 menjadi 783. Nah inilah yang menyebabkan biaya bertambah karena memang penyelenggaranya dan lembaga-lembaganya juga bertambah.

Kedua, ada kenaikan honorarium penyelenggara dari tahun 2014 ke 2019. Honor itu misalnya untuk PPK, PPS, kemudian KPPS, panitia di luar negeri, itu mengalami kenaikan. Tentunya kita menghitung sesuai dengan usulan dari KPU untuk mengadopsi dampak inflasi (sehingga) biaya untuk honor mengalami kenaikan. Inilah dua faktor yang menyebabkan biaya di 2019 meningkat cukup signifikan dibandingkan 2014.

Pada Pemilu 2019, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden diselenggarakan secara serentak. Apakah hal ini berdampak pada efisiensi anggaran?

Ada, pasti ada (efisiensi). Jadi biasanya persiapan untuk Pilpres dan Pileg itu yang dulu dua-duanya harus kita danai, ini bisa digabung. Misalnya (anggaran) kotak suara, saksi, dan lain-lain. Di satu sisi, memang menjadi salah satu tujuan kenapa digabung adalah untuk efisiensi biaya. Kita bayangkan setahun dua kali mengadakan, itu *wasting time*, SDM, biaya, (dimana sebelumnya) kita harus melakukan kegiatan (Pilpres dan Pileg) sampai dua kali, (yaitu) April kemudian Oktober. Itu tentu sangat menyita waktu. Dengan digabung, (maka) fokus semua jadi satu, ya biaya, SDM, waktu. Itu tujuannya.

Alokasi anggaran pengamanan untuk kegiatan Pemilu 2019 cukup besar. Apakah hal ini ditujukan agar Pemilu berjalan aman, sehingga tidak berdampak negatif bagi kondisi ekonomi dan investasi?

Tentunya ini (penyelenggaraan Pemilu) didukung dengan anggaran keamanan. (Anggaran) keamanan semakin meningkat (disebabkan) oleh banyaknya obyek yang harus diamankan, sehingga personel

kepolisian (yang ditugaskan) juga bertambah. Ini untuk meyakinkan supaya pesta demokrasi ini betul-betul bisa dijaga stabil dan aman. Kalau aman, maka akan menjaga kegiatan ekonomi kita, iklim investasi dan lain-lain. Itu saling melengkapi *lah*. Namun yang pasti, kalau sukses ini juga akan menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia bisa (untuk) pertama kali menyelenggarakan pesta demokrasi sekaligus (Pilpres dan Pileg). Kita beberapa periode yang lalu sudah berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi yang aman. Beberapa periode yang lalu, sejak era demokrasi, (untuk Pemilu) yang dipilih langsung. Sekarang ini adalah periode penggabungan pemilihan yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

Bagaimana keterkaitan penyelenggaraan Pemilu dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara?

Memang harus dilakukan studi mendalam mengenai hal itu. (Namun), kalau kita lihat secara logika, pasti punya dampak ke ekonomi. Kita bisa lihat, dengan Pemilu setiap 5 tahun sekali maka akan ada konsumsi yang meningkat dari anggota dewan, *even* dari parpol, (maupun) dari capres untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye. Banyak hal yang bisa kita lihat mulai dari spanduk, baju, kemudian dari mungkin mengadakan pertunjukan, kegiatan kampanye di dalam gedung, hotel, yang kemudian berdampak kepada penyediaan konsumsi, catering, dan lain-lain. Kita yakin itu pasti punya dampak (ekonomi).

Sebab kenapa, kita tahu baik individual saja untuk menjadi calon, apakah calon DPR, DPD, ataukah DPRD, mereka harus konsumsi mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan mereka sampai dengan Pilpres. Tentunya, setiap belanja dari partai, calon-calon anggota dewan, calon anggota DPD, itu pasti punya (dampak), *even* sampai calon presiden pun pasti punya dampak konsumsi jika kita bandingkan dengan kondisi yang stabil.

Kemudian, dari hitungan periode yang lalu, ada juga kajian yang menunjukkan bahwa dampak (Pemilu) terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 sampai 0,2 persen *point*. Itu dari analisa kajian yang dilakukan (untuk) Pemilu 2014 yang lalu. Tentunya untuk 2019 ini (hal) itu perlu dikaji lagi ya, berapa banyak (dampak ekonominya), apakah lebih besar, lebih tinggi, atau sama dengan (Pemilu) 2014 lalu.

Teks Farida Rosadi

Trivia

Tahukah kamu?



Kementerian Keuangan memiliki Museum Perbendaharaan yang diresmikan pada 2016 dan berlokasi satu gedung dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Bandung tepatnya di sayap barat lantai 1 Gedung Dwiwarna yang juga merupakan bangunan historis bernilai sejarah tinggi. Lokasi tempat museum berada ini dahulu menjadi lokasi rapat komisi Konferensi Asia Afrika (KAA).

Pembangunan interior fisik Museum Perbendaharaan dilakukan dalam kurun 1 tahun dan selesai tanggal 21 November 2015. Sedangkan kegiatan identifikasi dan pengumpulan benda sejarah selesai pada Februari 2016.

Museum Perbendaharaan ini didirikan untuk mengenalkan sejarah keuangan negara, sistem pengeolaan anggaran, serta alat-alat perancangan anggaran kuno. Museum ini dibuka untuk masyarakat umum secara gratis

Foto Yoyon Daryono

Sigap Mengolah Limbah

Penduduk Jakarta terus bertumbuh, pemukiman di ibu kota makin padat. Data BPS per 2017 mencatat jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,17 juta jiwa, padahal luas wilayahnya hanya 663,3 kilometer persegi. Tingginya tingkat kepadatan penduduk berpengaruh besar terhadap sanitasi. Tak dapat dipungkiri, limbah menjadi kian berlimpah. Jika tak sigap diolah, limbah akan sangat berbahaya bagi warga ibu kota. Untuk mengetahui lebih jauh seputar pengolahan limbah di kota Jakarta, Media Keuangan mewancarai Direktur Utama PD PAL Jaya Dr. Subekti, SE. Berikut petikannya.

Waduk
Setiabudi PAL
Jaya

Foto
Dok. PAL Jaya

Bagaimana Anda melihat kualitas air di Jakarta saat ini?

Air memiliki siklus, tetapi terkadang kita berpikir sepotong-sepotong saja tentang air. Sebutlah siklusnya dimulai dari air minum. Tingkat konsumsi air tanah untuk air minum di Jakarta masih tinggi sekitar 40 persen. Usai dikonsumsi, 90 persen air minum berubah menjadi air limbah yang akan masuk ke dalam tanah atau sungai (badan air). Oleh sebab itu, air limbah harus diolah terlebih dahulu.

Saat ini, 46,21 persen air limbah di Jakarta sudah diolah dengan aman. Dari jumlah tersebut, air limbah yang diolah dengan sistem perpipaan (*off site*) mencapai 11,81 persen, dengan *Individual Treatment Plant* (ITP) 25 persen, dan dengan tangki septik (pengolahan lumpur tinja) 9,4 persen. Dengan demikian, masih ada 53,79 persen air limbah tidak aman yang terdiri atas 49,11 persen air limbah diolah dengan tangki septik tidak aman (bocor/rembes) dan 4,68 persen kejadian Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Secara umum, dapat dikatakan kondisi kualitas air di Jakarta kini masih sangat buruk. Sungai Ciliwung terkontaminasi bakteri *E. coli* hingga 35.000.000/100 cc, sedangkan standar baku mutu hanya 2.000/100 cc. Ini menunjukkan walau kondisi sungai sudah bersih dari sampah, kualitas airnya ternyata masih tercemar bakteri. Itulah mengapa, sebagian besar air tanah di Jakarta tercemar bakteri *E. coli*. Kesadaran penggunaan tangki septik yang aman juga perlu ditingkatkan. Tangki septik bagus adalah kedap dan tidak bocor/rembes. Lantaran kedap, setiap tiga tahun tangki septik perlu disedot. Selama ini warga mengira tangki septiknya baik-baik saja meski hingga sepuluh tahun tidak pernah disedot, padahal justru

seperti itu yang perlu dicurigai. Bisa jadi tangki septiknya rembes dan mencemari air tanah.

Apa saja kegiatan atau layanan yang dilakukan PD PAL Jaya untuk meningkatkan kualitas air di Jakarta?

Kami punya *master plan* untuk Jakarta. Kota ini kami bagi menjadi 15 zona, terdiri atas 14 zona baru, yaitu zona 1 sampai zona 14 dan zona 0 atau *existing*. Zona 0 sudah memberikan layanan sistem perpipaan (*off site*). Dengan sistem ini, pengolahan limbah dari sumbernya dialirkan melalui pipa untuk diolah. Wilayah sistem perpipaan masih kecil, antara lain di kawasan SCBD, Senayan, Sudirman-Thamrin, dan kawasan gedung perkantoran lainnya. Namun, dalam waktu dekat sistem ini akan dibangun di zona 1, 2, 5, 6, 8. Kebetulan seluruh zona tersebut berada di kawasan pantai. Salah satu prasyarat untuk membuat *giant sea wall* adalah membereskan masalah limbah terlebih dahulu. Jika tidak, akan luar biasa bahaya.

Layanan berikutnya yakni sistem setempat (*on site*). Kami punya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk melayani buangan air dari wilayah yang belum terpasang jaringan pipa air limbah. Terdapat sarana truk tinja sebagai alat sedot tinja yang dikumpulkan warga pada tangki septik. Ada nomor *hotline* yang bisa dihubungi warga. Kami menjamin 100 persen bahwa yang disedot tidak akan dibuang ke sungai, tetapi harus diolah di IPLT. Ada dua IPLT, untuk Jakarta sisi barat di Duri Kosambi dan Jakarta sisi timur di Pulo Gebang. IPLT Duri Kosambi menggunakan sistem konvensional dan *Sludge Acceptance Plant* (SAP), sedangkan IPLT Pulo Gebang hanya menggunakan sistem konvensional. Layanan kami lainnya

adalah penyedotan lumpur tinja, daur ulang, operasi, dan pemeliharaan.

Apakah alat PD PAL Jaya bisa menjangkau rumah di gang-gang kecil?

Pipa kami memiliki rekor bisa menjangkau jarak sejauh 260 meter dari truk tinjanya. Namun, rata-rata penggunaan pipa di kisaran 100 hingga 150 meter. Sejauh ini, layanan penyedotan di rumah penduduk yang masih ke gang-gang kecil bisa diselesaikan dengan baik.

Teknologi seperti apa saja yang sudah dimiliki oleh PD PAL Jaya?

Kami memiliki produk Bio PAL yang dikembangkan sendiri. Produk ini merupakan *modified septic tank* yang bisa digunakan untuk dua jenis air limbah domestik, yaitu *black water* dan *grey water*. *Black water* merupakan air limbah dari kotoran tinja. Sementara, *grey water* berasal dari kegiatan sehari-hari seperti mandi dan cuci. Kedua jenis air limbah itu seharusnya diolah sebelum masuk ke drainase. Bio PAL dapat digunakan untuk mengolah kedua jenis limbah dimaksud.

Teknologi di pengolahan limbah sendiri sangat bermacam-macam, mulai dari biologis, mekanis, kimia, fisika, dan banyak teknologi pengolahan lainnya. Akan tetapi, yang paling terkenal dan paling mudah adalah biologis. Pengolahan limbah secara biologis ini memanfaatkan mikroorganisme berupa bakteri. Jadi, polutan yang ada pada air limbah menjadi makanan bakteri.

Apa saja tantangan yang dihadapi PD PAL Jaya dalam pengolahan air limbah?

Pertama, pengolahan air limbah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Tantangan kami adalah meningkatkan



Dr. Subekti,
SE., Direktur
Utama PD
PAL Jaya
menjelaskan
siklus air di DKI
Jakarta

Foto
Anas Nur Huda



pemahaman dari semua *stakeholders*, baik para pengambil keputusan maupun masyarakat, bahwa pengolahan air limbah adalah sebuah fasilitas dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah.

Kedua, pengolahan air limbah adalah cermin peradaban suatu negara. Itu sebabnya negara-negara maju selalu menghargai air limbah. Sekarang negara kita masih belum sampai ke sana. Data statistik menunjukkan sekitar 9 persen masyarakat Indonesia masih melakukan BABS. Dengan demikian, sekitar 91 persen masyarakat sudah tidak BABS. Namun, dari yang tidak BABS tersebut, ternyata penggunaan tangki septik yang sudah *safely managed* masih sedikit. Banyak risiko yang harus ditanggung jika limbah tidak diolah dengan baik. Dalam jangka pendek, air limbah dapat menyebabkan penyakit kulit, diare, dan hepatitis. Untuk jangka waktu yang lebih panjang, limbah dapat menyebabkan *stunting*. Balita yang terkena *stunting* akan terganggu pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.

Apa yang bisa dilakukan masyarakat supaya dapat turut mengolah air limbah?

Limbah yang mereka hasilkan harus diwadahi di tempat kedap. Tangki septik disebut aman bila kedap, tidak bocor/ rembes. Walaupun kedap, masyarakat tetap perlu dilakukan penyedotan secara rutin setiap tiga tahun sekali. Selain itu, masyarakat jangan lagi melakukan BABS. Angka BABS di Jakarta cukup banyak. Kurang lebih 5 persen atau 500.000 orang di ibu kota masih BABS di sungai, laut, taman, rel kereta, dan tempat umum lainnya. Bahkan ada sebagian toilet di Jakarta yang tidak memiliki tangki septik. Limbah tinja yang dihasilkan langsung masuk ke drainase. Yang seperti itu juga termasuk BABS. Drainase seharusnya bukan untuk air limbah, melainkan untuk menampung air hujan.

Apa harapan Anda terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengolahan limbah?

Kami bersyukur dengan adanya dukungan luar biasa dari pemerintah daerah. Program pembangunan zona-

zona pengolahan air limbah dimasukkan ke kegiatan strategis daerah. Harapan berikutnya, infrastruktur pengolahan air limbah dapat dilengkapi dengan perangkat regulasi yang *proper*. Sebagai contoh, pada 2006 lalu Malaysia mengeluarkan undang-undang baru tentang bagaimana merestrukturisasi air minum dan air limbah di sana. Mungkin negara kita dapat melakukan hal serupa.

Edukasi terhadap para pelanggan juga perlu terus digencarkan, misalnya kepada para penghuni gedung-gedung perkantoran. Terkadang masih ada saja yang sering membuang benda-benda asing ke toilet kantor. Bayangkan jika benda-benda tersebut masuk ke jaringan perpipaan sedalam 32 meter, akan berat sekali *maintenance*-nya bagi kami. Selain itu, PD PAL Jaya masih harus terus mengedukasi masyarakat, misalnya melalui program PD PAL Goes To School. Kami meyakini edukasi pengolahan limbah harus dilakukan sejak dini. Hal ini lantaran kita sedang berupaya membangun peradaban.

Teks Reni Saptati D.I

LAYANAN CONTACT CENTER TERINTEGRASI Ditjen Perbendaharaan



Email

Pengguna dapat bertanya ke HAI-DJPB melalui email ke:
hai.djpb@kemenkeu.go.id



Live Chat

Komunikasi secara real time dengan agen via chat melalui widget di pojok kanan bawah laman HAI-DJPB



HAI-PEDIA **BARU!**

Kumpulan aturan, FAQ, dan artikel terkait perbendaharaan



HAI-CSO

Integrasi HAI-DJPB dan OMSPAN untuk satuan kerja dan CSO KPPN/ Kanwil melalui laman: spanint.kemenkeu.go.id



Broadcast

Penyampaian informasi, status gangguan atau perubahan layanan di DJPB



Call Center

Hubungi 14090 untuk berbicara dengan agen call center HAI-DJPB

Perjuangkan Keyakinan

Didik Kusnaini

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran
Direktorat Jenderal Anggaran

Suara ayam jantan melengking memecah kesunyian di pagi hari. Dua pedal sepeda ‘on the’ bergantian memutar menggerakkan laju rodanya.

Meski dingin, sesosok anak duduk dengan rapi di belakang sadel. Tangannya erat memegang lingkaran perut sang ayah yang berada di depannya. Hari itu, ia diajak ke tempat ayahnya bekerja yang merupakan sebuah sekolah. Jarak tempuh yang jauh tak menyurutkan niat anak tersebut mendampingi sang ayah. Justru sang anak merasa bersemangat.

Sang ayah yang merupakan sosok guru memang patut ditiru. Walaupun mayoritas penduduk kampung bekerja tak jauh dari rumah, sang guru bersedia menempuh jarak hampir tiga puluh kilometer setiap harinya. Alasannya pun membuat sang anak termotivasi. “Ini merupakan tanggung jawab sebagai guru kepada anak-anak. Jadi Bapak dulu jauh-jauh naik sepeda untuk mengajar. Intinya ketika kita diberi tanggung jawab ya harus dijalankan tanpa mengeluh,” ungkapnya.

Dengan mengenal lingkungan tempat ayahnya bekerja, sang anak merasa terinspirasi untuk bekerja tanpa pamrih dengan terus memberi manfaat pada orang lain. Sosok orang tua yang berprofesi sebagai guru juga menginspirasi untuk terus belajar tanpa henti. Hasilnya, ia pun kini berhasil memperoleh amanah untuk menjadi salah satu direktur di lingkungan

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Ialah Didik Kusnaini yang kini menjabat sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran (HPP).

Terhubung dengan APBN

Masuk pertama kali sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan pada tahun 1999, Didik sudah harus menghadapi masa pemulihan krisis ekonomi 1998. Sebagai pegawai baru di Badan Analisa Keuangan dan Moneter, ia tak jarang untuk pulang larut malam atau bahkan menginap di kantor untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menangani krisis kala itu.

“Karena waktu itu musim Reformasi, sehingga DPR-nya pun sangat kuat, sangat kritis, sangat aktif. Kemudian di sisi lain, kita juga punya tanggung jawab menyampaikan *progress report* reformasi struktural yang tertuang dalam *Letter of Intent* kepada IMF. Dua hal ini yang membuat Kementerian Keuangan saat itu sangat sibuk sekali. Ibaratnya pertanggungjawabannya tiga, satu ke Presiden, dua ke DPR, tiga ke IMF,” kenangnya sembari bercerita kepada Media Keuangan.

Hingga kini, ia sudah terbiasa dengan pola kerja yang ekstra, bahkan di luar kondisi krisis. Saat kondisi krisis-krisis berikutnya, ia sudah memiliki pengalaman untuk mengelola APBN dalam menghadapi krisis. Pengalaman menarik lainnya, pernah suatu saat ia bersama dengan Menteri

Keuangan Agus D.W. Martowardodjo melakukan pengajuan perubahan APBNP 2012.

Kala itu, pemerintah ingin menjaga kesehatan fiskal dengan mengurangi belanja subsidi BBM yang sangat tinggi. Namun demikian, proses legislatif yang alot menyebabkan proses pengesahan mencapai *deadlock* sampai menjelang paripurna. Rapat sempat ditunda beberapa jam untuk kemudian disepakati menjelang tengah malam. Untuk mempersiapkan berbagai macam perubahan sesuai kesepakatan Pemerintah dan DPR kala itu, maka tim Pemerintah harus kerja keras menyusun APBNP hanya dalam waktu lima belas menit.

“Dari Pak Agus Marto itu saya belajar. Waktu itu DPR *keukeuh* banget. Mestinya kan tahapannya kalau sudah sampai di Paripurna sudah selesai. Itu tinggal ketok. Nah kita sudah menyiapkan RUU dan sebagainya sesuai tahapan sebelumnya. Tetapi malam itu karena *deadlock* dan sama-sama *keukeuh*,” ujarnya.

Meski demikian, Didik belajar bahwa kita perlu memperjuangkan apa yang kita yakini benar semaksimal mungkin. Dengan begitu, hasil akhir akan memberikan manfaat terbaik untuk semua pihak. “Dari situ saya belajar kalau kita yakin dengan apa yang kita yakini, bahwa apa yang diusulkan Pemerintah kita yakin benar, pertahankan sampai semaksimal mungkin,” jelasnya.



Foto
Anas Nur Huda

Setelah hampir dua puluh tahun berkarier di bidang APBN, Didik kini dipercaya menjadi Direktur HPP. Empat bulan lebih di Direktorat HPP, Didik memiliki tugas utama untuk mengharmonisasikan peraturan anggaran, terutama regulasi di bidang keuangan dan penganggaran.

“Kalau arahan Bu Menkeu Sri Mulyani harus bisa membebaskan Indonesia dari *middle-income-trap*. Sehingga regulasi pun harus mengarah dan mendukung upaya pencapaiannya. Langkah-langkahnya, satu kita coba *mapping* perundangan, regulasi dan sebagainya yang menimbulkan sumbatan itu di sebelah mana, itu yang nanti kita *debottle-necking*,” ungkapnya.

Hal itu dapat dilakukan dengan menlakukan penyederhanaan dan pelonggaran regulasi yang menghambat. Menurutnya, regulasi itu harus bisa menyambung dengan kebijakan makronya. Oleh karena itu, sebelum proses *drafting* regulasi, perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi dengan kebijakan makronya. **Sang Guru**

Memiliki kedua orang tua yang juga merupakan pendidik, sang ayah, Anhar Kustoyo, dan sang ibu, Djuminah, selalu memberikan contoh dan teladan yang tak ada habisnya kepada Didik. Meski kesejahteraan guru tergolong menengah, namun Didik sadar orang tuanya dihormati karena sosok gurunya. “Dari Bapak dan Ibu yang guru itu saya belajar banyak. Karena dari situ selalu diberi contoh. Kalau guru kan harus belajar terus, jadi saya harus mengikuti,” cerita Didik.

Kebiasaan hidup bersahaja atau prihatin memberikan makna tersendiri bagi Didik. Ia belajar untuk hidup sesuai dengan kebutuhan bukan sekedar keinginan. “Yang kedua, yang ditanamkan dari keluarga besar saya itu kombinasi antara nilai-nilai sopan santun Jawa dengan nilai-nilai agama. Itu yang terus sampai sekarang. Jadi bagaimana menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang lain bahkan yang mungkin dipandang rendah orang lain,” ceritanya.



Berkumpul bersama keluarga

Foto
Dok. Pribadi

Tak hanya itu, sang guru juga mengajari Didik tanggung jawab dan kerja keras. Sewaktu kecil ia memperoleh tanggung jawab sendiri untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bersama dengan keempat saudaranya, ia sudah terbiasa mengerjakan bagian masing-masing. “Siapa yang menyapu halaman, siapa yang nyuci. Nanti yang nyuci itu dibagi, ada yang menyuci piring karena adik masih kecil belum mendapat tugas kami bertiga yang melakukan. Jadi dari kecil pun ada yang sampai sekarang masih saya ambil nilai-nilainya,” ujarnya.

Komitmen keluarga

Menyadari ritme pekerjaan yang sangat dinamis, Didik sempat menjelaskan kepada sang istri terkait pekerjaannya sebelum menikah. Sang istri, Elya Nurwullan, pun menerima dan memberikan dukungan kepadanya. Sampai saat ini, istri dan ketiga anaknya, Daffa Fathani Adila, Salma Faizati Adila, dan Barra Fakhri Adila, senantiasa mendukung sang kepala keluarga.

Meski begitu, dengan adanya teknologi saat ini, Didik berusaha mengatur strategi agar dapat memaksimalkan waktu bersama keluarga. Untuk akhir pekan, Didik sering mengajak jalan santai ketiga anaknya ke sawah atau kebun. Ia juga senantiasa menyisipkan nilai-nilai spiritual dan kerja keras kepada anak-anaknya. “Yang jelas nilai-nilai yang saya yakini, yang saya tanamkan pertama selain masalah spiritual, keyakinan itu, bahwa kalau ingin sesuatu harus diperjuangkan. Kita ingin sukses

harus diperjuangkan. Harus bekerja keras. Tidak akan datang dengan sendirinya,” ungkap Didik.

Harapan

Terkait pandangan terhadap institusi ke depannya, Didik berharap Direktorat HPP pada khususnya dan Direktorat Jenderal Anggaran pada umumnya mampu mendukung misi besar dari bangsa dan negara Indonesia, yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang adil dan makmur. Ia juga menaruh harapan agar Direktoratny saat ini bisa menjadi yang terdepan untuk bidang peraturan penganggaran, sehingga misi dari Kementerian Keuangan ini bisa terwujud.

“Dalam batas-batas kewenangannya kita harus men-*support* itu semua. Sampai di mana sesuai dengan batas-batasnya. Kalau kita di HPP tusinya adalah menyusun dan mengharmoniskan penganggarnya. Bagaimana peraturan penganggaran ini nanti bisa men-*support* tujuan dari bernegara itu,” harapnya.

Ditanya harapan untuk diri sendiri, Didik tak ingin muluk-muluk. “Yang penting, pertama tidak menyusahkan orang. Yang kedua, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi minimal itu, tidak menyusahkan orang. Jadi bisa mandiri, tidak menyusahkan orang, tidak membuat tergantung ke orang, dan syukur-syukur bisa bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Teks Abdul Aziz

Opini

Enterprise Architecture Dukung Transformasi Digital Kemenkeu

Adek R. Muchtar,
Central Transformation Office (CTO)

Transformasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mulai digulirkan sejak awal 2000-an. Hal ini dimulai dengan dilaksanakannya reformasi pengelolaan keuangan negara pada 2002-2006. Pada proses inilah, tiga paket Undang-Undang (UU) yang mengatur keuangan negara disahkan. Ketiga paket UU tersebut adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Selanjutnya, untuk memperkuat reformasi pengelolaan keuangan negara, Kemenkeu melakukan reformasi birokrasi secara masif. Hal ini dilanjutkan dengan transformasi organisasi melalui penetapan dan implementasi cetak biru Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Sejumlah inisiatif strategis dan arah kebijakan dijalankan guna mendukung program ini. Setelah melalui berbagai tahapan reformasi tersebut, kini saatnya bagi Kemenkeu untuk menyambut fase berikutnya, yaitu transformasi digital.

Transformasi digital merupakan suatu perubahan mendalam yang melibatkan teknologi digital dalam kegiatan bisnis utama yang berpengaruh pada produk, proses dan kompetensi,

serta struktur organisasi dan konsep manajemennya (Matt et al., 2015). Pada awal kemunculannya, transformasi digital hanya diimplementasikan dalam konteks bisnis. Namun dalam perkembangannya, transformasi digital juga menyentuh organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan pada sektor publik. Tidak sampai di situ, sebuah penelitian menunjukkan, pemerintah merupakan elemen kunci dalam keberhasilan penataan transformasi digital (Tannou & Westerman, 2012). Maka, dengan ditetapkannya transformasi digital sebagai bagian inisiatif strategi di Kemenkeu, diharapkan bisa menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mengapa transformasi digital?

Perkembangan yang terjadi di dalam maupun luar Kemenkeu tak ayal membuat implementasi transformasi digital di tubuh Kemenkeu tidak lagi dapat ditunda. Salah satu pemicunya adalah tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia di internal Kemenkeu. Pada 2019, misalnya, 62 persen pegawai Kemenkeu adalah generasi milenial. Sudah sewajarnya,

Ilustrasi
Dimach Putra



Dari kedua kata tersebut, bisa disimpulkan bahwa tujuan utama EA adalah bagaimana manajemen yang terintegrasi dapat dijalankan melalui berbagai sumber daya IT, sesuai dengan strategi bisnis organisasi.

tingkat pengetahuan mereka terhadap teknologi (*technology savvy*) juga semakin tinggi. Selanjutnya, budaya digital juga berkembang begitu cepat di kalangan pegawai. Hal ini disertai dengan kebutuhan *skill set* baru dalam era digital.

Tantangan dan perkembangan organisasi yang semakin kompleks jadi pemicu lain mengapa transformasi digital perlu segera digulirkan. Pada satu sisi, sistem yang semakin kompleks menuntut perlunya efisiensi belanja dalam membangun sistem teknologi dan informasi. Namun pada sisi lain, harus dipastikan bahwa pembangunan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi.

Dengan kata lain, Kemenkeu senantiasa dituntut untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui transformasi digital di tubuh Kemenkeu, masyarakat diharapkan bisa ikut menikmati kemajuan teknologi. Sementara para *stakeholders* dapat terpenuhi kebutuhannya akan perlindungan data dan informasi.

Selain isu-isu terkait SDM dan organisasi, transformasi digital pada dasarnya merupakan respons atas kondisi yang berkembang di tingkat global. Hadirnya era digital ekonomi yang mengusung *block chain payment network*, serta fenomena *disruption* melalui kemunculan sejumlah *start-up company* (seperti GOJEK, traveloka, dan airbnb) yang menggantikan perusahaan konvensional, menjadikan transformasi yang cepat, tepat, dan efisien menjadi suatu keniscayaan.

Begitupun dengan kehadiran *financial technology (fintech)*, seperti Go-Pay, Ovo, dan DOKU. Hal ini menjadikan teknologi pada industri

keuangan turut berkembang pesat. Berdasarkan Fintech Indonesia Report 2018, peningkatan investasi di pasar *fintech* Indonesia mencapai USD177 juta pada 2017. Nilai transaksi di pasar ini pada 2018 diprediksi lebih dari USD22 miliar. Artinya, tingkat pertumbuhan investasi di pasar *fintech* mencapai 16,3 persen per tahun.

Implementasi Enterprise Architecture di Kemenkeu

Berbagai literatur menunjukkan definisi yang beragam mengenai istilah *Enterprise Architecture* (EA). Meski demikian, studi yang dilakukan oleh Nam, et al. (2016) menunjukkan bahwa dari beragam definisi yang ada, terdapat terminologi yang umum digunakan, yaitu integrasi dan strategi. Dari kedua kata tersebut, bisa disimpulkan bahwa tujuan utama EA adalah bagaimana manajemen yang terintegrasi dapat dijalankan melalui berbagai sumber daya IT, sesuai dengan strategi bisnis organisasi.

Adapun definisi yang dipakai dalam proses pengembangan EA di Kemenkeu adalah suatu metode perencanaan strategis organisasi untuk mencapai visi dan misi organisasi dengan melakukan perbaikan pada bisnis, informasi, teknologi yang digunakan (Earnst & Young, 2018). Dengan kata lain, EA merupakan cetak biru dari bisnis organisasi yang disusun dengan *me-redesign* proses bisnis dan arsitektur IT, sehingga mampu mendukung strategi Kemenkeu ke depan.

Maka, langkah pertama yang dilakukan dalam membangun EA adalah menyusun *visioning* Kemenkeu dan melakukan *assessment* mengenai kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan EA. Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan seluruh pimpinan Kemenkeu, mulai dari menteri dan jajaran eselon 1, serta *stakeholder* Kemenkeu, seperti OJK, Kementerian Dalam Negeri, Kominfo, BI, dan Kementerian/Lembaga lainnya. Dari hasil wawancara tersebut, dirumuskan visi dan misi digital Kemenkeu ke depan.

Tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan arsitektur. Salah satunya penyusunan draft *as-is architecture* yang menggambarkan kondisi Kemenkeu saat ini. Pembahasan dan konfirmasi dilakukan atas proses bisnis dan daftar aplikasi yang dimiliki organisasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dilakukan *initial gap analysis* dan identifikasi solusi sesuai ekspektasi terhadap *as-is* proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Saat ini Kemenkeu sudah berada pada level *gap analysis*. Selanjutnya dilakukan pemilihan solusi dan proses

migrasi. Pada tahap akhir, dilakukan implementasi solusi dan manajemen perubahan.

Manfaat dan tantangan implementasi EA

Berbagai manfaat diharapkan bisa didulang Kemenkeu melalui implementasi EA. Manfaat tersebut diantaranya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan IT, *Return on Investment* yang lebih baik karena turunnya risiko investasi di masa depan, serta pengadaan infrastruktur yang lebih cepat, mudah, dan ekonomis karena keputusan pengadaan infrastruktur betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan (Togaf 2009).

Selain itu, melalui implementasi EA, perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik. Begitupun dengan kegiatan komunikasi antara bidang IT dan bidang bisnis dalam suatu unit organisasi. Selanjutnya, implementasi EA diharapkan mampu

memberikan pandangan arsitektural atas kompleksitas sistem yang besar, hingga dapat memfasilitasi manajemen organisasi (World Bank, 2016).

Namun demikian,antisipasi terhadap tantangan yang mungkin timbul tetap diperlukan. Sebab, transformasi digital merupakan perubahan berskala besar yang meliputi seluruh lapisan di Kemenkeu. Penelitian internasional menunjukkan, sebagian besar kegagalan transformasi berskala besar disebabkan oleh tantangan yang timbul dari internal organisasi, yaitu faktor kepemimpinan dan SDM. Sebanyak 70 persen transformasi yang dilakukan, gagal mencapai target yang diharapkan (McKinsey, 2014).

Hasil penelitian tersebut menemukan adanya empat tantangan utama yang menyebabkan gagalnya transformasi. Pertama, resistensi pegawai atas perubahan. Kedua, perilaku manajemen yang tidak mendukung perubahan. Ketiga, sumber daya dan anggaran yang tidak mencukupi. Keempat tantangan lain, seperti tekanan politik. Bahkan, tingkat kegagalan tersebut ditemukan lebih tinggi pada organisasi di sektor publik. Kegagalan tersebut sebagian besar disebabkan oleh banyak dan beragamnya *stakeholder* yang harus dikelola organisasi di sektor publik.

EA merupakan pintu gerbang bagi Kemenkeu untuk menuju transformasi digital. Pendekatan holistik diharapkan dapat dilakukan dalam implementasi ini. Namun, pendekatan tersebut tidak hanya terbatas pada penanganan aspek teknis dalam menjalankan inisiatif transformasi, tetapi juga untuk memastikan adanya dukungan dari seluruh jajaran, mulai dari level pimpinan hingga seluruh pegawai Kemenkeu.

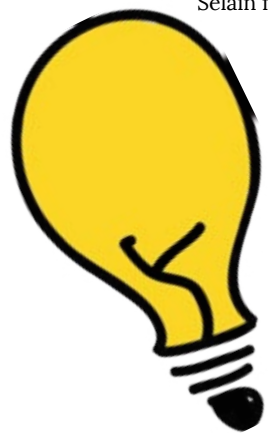


Survei MOFIN dan The New Thinking of Working

Pandu Rizky Fauzi, SE., MBA., ACSI,
Sekretariat Jenderal

Kemajuan teknologi informasi dan kehadiran era revolusi industri 4.0 telah mendorong terjadinya perubahan cara manusia melakukan segala sesuatu. Perubahan tersebut tidak terbatas pada cara memproduksi barang, berbelanja, mengakses informasi, dan menggunakan sarana transportasi saja. Namun, perubahan dimaksud juga telah menyentuh aspek manajerial dan operasional pada dunia kerja.

Konkretnya, terdapat tren organisasi untuk mencari cara-cara baru yang bisa meningkatkan kepuasan dan retensi pegawainya. Oleh sebab itu, muncullah paradigma baru dalam dunia kerja yang disebut “*the new thinking of working*”.



Selain faktor teknologi, masuknya Generasi Z ke dunia kerja dan semakin banyaknya Generasi Y pada piramida pegawai turut berkontribusi untuk mempercepat implementasi *New Thinking of Working* (NToW).

Umumnya, NToW dicirikan dengan berbagai inisiatif untuk meningkatkan fleksibilitas di kantor. Misalnya fleksibilitas pengaturan meja kerja dalam bentuk *open space* atau *co-working space*, fleksibilitas waktu bekerja (*flexy time*), dan fleksibilitas tempat bekerja (*telecommuting*). Peningkatan fleksibilitas ini dipilih lantaran dipercaya sebagai hal yang dapat mempertahankan talenta terbaik dari generasi ini.

Peter Thomson (2019) dari lembaga *Future Work Forum* menyebut karakter generasi millennial ini umumnya memiliki *value* yang tinggi terhadap kebebasan individu dan fleksibilitas, sehingga sangat menghargai diskresi yang diberikan di tempat kerja. Hal ini diperkuat dengan temuan survei milenial global yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2018, yang menyebut faktor keragaman, inklusi, dan fleksibilitas sebagai hal-hal yang mampu membuat milenial bahagia dan bertahan di tempat kerjanya.

Survei yang diikuti oleh 10,455 Gen Y dan 1,844 Gen Z dari 36 negara ini juga mengungkap bahwa gaji yang besar dan budaya kerja perusahaan merupakan dua hal yang paling menarik bagi milenial ketika akan memutuskan bekerja di mana. Selain itu, terungkap bahwa meskipun

Ilustrasi
A. Wirananda



milenial sering diasosiasikan sebagai generasi melek teknologi, ternyata banyak di antara mereka yang sebetulnya mengalami kecemasan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk itu, mereka berharap kantornya menyediakan program-program pengembangan kompetensi. Dan hal inilah yang menurut Deloitte perlu diperhatikan oleh pemberi kerja.

Millennial, NToW, dan survei MOFIN Kemenkeu

Berdasarkan hasil survei Universum, sebuah lembaga *branding* dan *talent market* global, terungkap bahwa pada tahun 2017 Kemenkeu menjadi tempat kerja idaman kedua bagi para mahasiswa

jurusan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Posisi Kemenkeu tersebut bahkan berada di atas beberapa perusahaan nasional dan multinasional seperti Pertamina (3), Unilever (5), Google (6), Garuda Indonesia (7), dan NET Mediatama (10). Kemenkeu hanya kalah secara *branding* dari Bank Indonesia yang memuncaki peringkat survei.

Saat ini, komposisi jumlah pegawai Kemenkeu yang berasal dari Gen Y dan Gen Z masing-masing telah mencapai 33,155 orang (41,7 persen) dan 16,424 orang (20,7 persen). Dengan tingginya porsi jumlah pegawai muda tersebut, Kemenkeu sedang dihadapkan pada tantangan manajerial untuk mengelola generasi milenial.

Tantangan pengelolaan milenial tersebut terungkap melalui hasil survei penilaian kesehatan organisasi Kemenkeu (survei MOFIN) tahun 2017 lalu. Generasi milenial dan pegawai baru Kemenkeu ternyata memiliki persepsi terhadap praktik kesehatan organisasi yang paling rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Beberapa praktik kesehatan organisasi yang dinilai merah oleh pegawai muda antara lain ada pada dimensi Motivasi, terutama untuk indikator Kesempatan Karir dan Penghargaan dan Pengakuan. Indikator lainnya yang turut dinilai merah yakni pada indikator Keterlibatan Pegawai, Manajemen Konsekuensi, dan Inovasi *Bottom Up*.

Terdapat dua penjelasan logis terhadap fenomena tersebut. Pertama, semakin tua usia pegawai dan semakin

lama dia bekerja di Kemenkeu, maka semakin banyak perubahan dan perbaikan yang telah ia saksikan. Sementara milenial yang datang setelah era Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan akan memiliki pandangan baru dan ekspektasi yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Kedua, bisa jadi para pegawai baru justru kurang mendapatkan informasi mengenai perbaikan-perbaikan praktik manajemen yang telah dilakukan Kemenkeu.

Untuk alasan yang pertama, maka solusinya adalah Kemenkeu harus terus mengembangkan inovasi manajerial, khususnya terkait NToW yang selaras dengan semangat kaum milenial. Adapun untuk alasan yang kedua, maka sosialisasi perbaikan praktik-praktik kesehatan organisasi kepada generasi muda Kemenkeu harus ditingkatkan. Terutama melalui cara-cara kreatif seperti *video story telling*, infografis, dan lainnya, yang mampu menggugah kesadaran dan kebanggaan mereka bekerja di Kemenkeu.

Selain itu, pegawai milenial di Kemenkeu hendaknya juga aktif mencari tahu perubahan-perubahan praktik manajemen yang telah dan akan dilakukan. Setelah tahu, selanjutnya ikut terlibat menjadi pelaku perubahan. Sebab, setiap masa pasti ada perubahan dan pelakunya, dan setiap pelaku perubahan pasti ada masanya. Di masa kini, kawan-kawan generasi milenial inilah yang diharapkan menjadi pelaku perubahan tersebut.

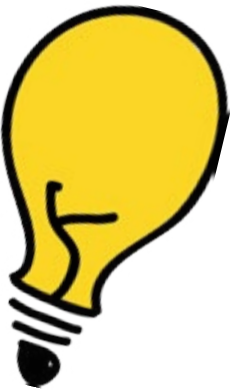
Jika dirasa masih ada praktik manajemen yang perlu diperbaiki di

Kementerian Keuangan, suara aspirasi pegawai tersebut dapat dilakukan melalui survei MOFIN yang akan diselenggarakan pada kuartal dua, tahun 2019 ini. Sebab, sebagai alat yang dimiliki oleh pengelola organisasi, survei MOFIN inilah yang akan mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan praktik manajemen yang mendukung kesehatan organisasi, termasuk NToW. Survei ini juga yang menjadi kesempatan pegawai untuk menyampaikan saran perbaikan dan umpan balik atas kebijakan di bidang organisasi.

Ditambah lagi, perbaikan indeks persepsi kesehatan organisasi (indeks MOFIN) telah ditetapkan sebagai salah satu ukuran keberhasilan (*outcome*) inisiatif strategis pertama dari program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) tahun 2019, yakni Penguatan Budaya Organisasi melalui NToW.

Jadi, untuk kamu generasi muda Kemenkeu, jangan apatis. Ayo suarakan aspirasimu untuk Kemenkeu yang lebih baik.

*) Penulis merupakan Pegawai Sekretariat Jenderal, tulisan mencerminkan pendapat pribadi



KPPN Palu

Hikmah dan Berkah di Balik Musibah

Jujur, kami memang takut dengan gempa susulan yang kapan saja mungkin terjadi, tapi kami akan lebih takut lagi mana kala tidak bisa berbuat yang terbaik bagi negeri.

Suara Muhtar Salim bergetar membuka sesi wawancara dengan Tim Media Keuangan. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu ini menerawang jauh, mencoba mengingat kembali detail kejadian yang menghantam Palu pada Jumat di penghujung September 2018 lalu. "Jangan-jangan ini kiamat?" pertanyaan itu sempat terlintas di benak Salim, pun mungkin di pikiran seluruh warga Palu saat itu. Menjelang maghrib, di kota ini dipenuhi takbir dan teriakan dari seluruh penjuru kota.

28 September 2018 menjadi Jumat kelabu bagi warga Palu, Sigi dan Donggala (PASIGALA). Matahari perlahan turun di ufuk barat saat tiba-tiba gempa hebat mengguncang kota di dalam teluk ini. Belum surut kepanikan setelah gempa, pesisir teluk ini diterjang ombak tsunami. Kepanikan langsung menyergap warga kota dan wisatawan yang sebagian besar sedang berada di sepanjang garis pantai untuk meramaikan Palu Nomoni, festival tahunan di kota ini.

Saat peristiwa itu terjadi Salim baru

saja tiba di rumah sepulang dari kantor. Ia berniat untuk mempersiapkan diri menghadiri Palu Nomoni. Ia mendengar gemuruh suara yang menyertai guncangan hebat kota Palu dan sekitarnya. Setelah dirasa cukup aman, Salim bergegas kembali ke gedung kantor tempatnya memimpin. Di sana, beberapa wajah-wajah anak buah yang dikenalnya terlihat bergerombol di luar gedung, bercampur dengan warga sekitar yang berkumpul bersama-sama. Gedung megah yang sehari-hari menjadi tempatnya berkantor tetap berdiri, namun pada beberapa bagian dinding dan lantainya terdapat rekahan. Tak lagi aman dijadikan tempat memberi pelayanan.

Sigap pasca bencana

Tiga hari pasca bencana, tepatnya di hari Senin (01/10), KPPN Palu akhirnya dapat kembali menyambung komunikasi dengan kantor pusat. Inti dari pembicaraan tersebut membahas tentang kondisi para pegawai dan kelanjutan layanan di kantor tersebut terhadap *stakeholders*. Saat itu masih ada banyak pegawai yang belum diketahui kabar beritanya. Kepastian

mengenai kondisi 36 personel KPPN Palu baru diperoleh setelah lebih dari seminggu setelahnya. Beberapa pegawai memilih untuk mengungsi ke daerah yang aman terlebih dahulu. Untuk kembali juga susah karena terbatasnya transportasi dari dan ke Palu. "Arahan dari pusat memang evakuasi dulu, baru setelah selamat kemudian dipikirkan kelanjutan proses bisnis kantor ini," tambah Salim.

Setelah mendapat arahan dari pusat, seluruh jajaran di KPPN Palu pun mulai melakukan konsolidasi rencana strategi pemberian layanan dalam keadaan darurat. Bencana hebat yang terjadi di akhir bulan mendatangkan tantangan bagi kewajiban kantor ini, mengingat awal bulan Oktober tunjangan pegawai beberapa instansi harus segera terbayarkan, terutama kepada TNI dan Polri. Di hari ke empat, jaringan lokal, *server*, komputer serta *printer* berhasil dikeluarkan ke parkiran, tempat sementara yang akan digunakan memberikan layanan.

Pada hari Rabu, lima hari pasca gempa dan tsunami, kantor ini sudah menerima surat perintah membayar (SPM) dari TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung KPPN Palu pasca bencana

Muhtar Salim, Kepala KPPN Palu

Muhtar Salim dan Pegawai KPPN Palu saat memberikan layanan darurat dalam tenda

Saat ini operasional dan pelayanan KPPN Palu dilakukan di rumah kantor sementara.

Foto Resha Aditya Pratama

Foto KPPN Palu



Selanjutnya di hari ke enam bantuan sudah mulai datang termasuk teknisi, tenda, dan jaringan GSM untuk menjaga sambungan online KPPN ke berbagai sistem teknologi informasi yang ada. Tugas dan fungsi KPPN Palu terus berjalan meski diterpa gempa bumi yang dahsyat.

Perlahan bangkit kembali

Meski dituntut untuk berfokus pada keberlangsungan layanan pasca bencana, KPPN Palu juga tak lantas melupakan kebutuhan para pegawai yang sejatinya juga merupakan korban dari bencana tersebut. Meski tidak ada korban secara fisik, kesehatan mental para pegawai juga harus tetap diperhatikan.

"Sepuluh hari pasca terjadinya bencana, Pak Dirjen (Marwanto Harjowiryo), Sesditjen dan tim datang mengunjungi kami. Kehadiran beliau beserta tim dari pusat tersebut khusus untuk memberikan semangat dan menyediakan *trauma healing*, sekaligus menggali dan memetakan apa yang kami butuhkan," imbuhnya.

Tiga minggu berlalu, pelayanan di KPPN yang dilakukan sementara di bawah tenda mulai berjalan dengan baik. Setelah kehadiran Dirjen Perbendaharaan beberapa waktu sebelumnya, berita rencana kedatangan Menteri Keuangan dan jajaran petinggi Kementerian Keuangan lainnya menjadi angin segar bagi para garda depan penjaga keuangan negara yang bertugas di Palu. Kehadiran sang begawan keuangan membawa kesan dan motivasi tersendiri bagi mereka. "Di dalam tenda yang pengap dan panas, seorang menteri terbaik dunia mendatangi kami, menepuk pundak kami sambil membisikkan kalimat penyemangat," ungkapnya dengan mata berkaca-kaca. Salim melihat sosok sang pemimpin hebat, yang dari roman mukanya menunjukkan simpati dan empati mendalam. Menurutnya, hal sederhana tersebut mampu memberi kesejukan di hatinya dan pegawai lain.

Kehadiran menteri dan jajaran pimpinan pusat memberi lecutan spirit baru bagi mereka yang semangat bekerja di sana. Bencana hebat ini memberikan berkah dan hikmah tersendiri bagi pegawai di KPPN Palu ini. Mereka belajar untuk ikhlas memberikan layanan, meski kondisi mereka sendiri mungkin juga butuh diperhatikan. Semua itu dilakukan semata karena semangat melayani demi menepati janji yang telah diikrarkan sebagai abdi negeri.

Setelah satu bulan memanfaatkan tenda di halaman kantor, Salim berhasil mendapatkan tempat yang cukup baik untuk melanjutkan pelayanan dengan lebih layak. Sebuah rumah kantor empat lantai di ujung jalan tempat KPPN Palu yang mengalami kerusakan dan akan direnovasi, dijadikan kantor dan tempat memberikan layanan. Meski belum bisa maksimal, pelayanan yang dilakukan di lokasi baru ini digenjut semaksimal mungkin.

Target capaian kinerja KPPN Palu tahun 2018 juga tetap menunjukkan tren positif di tengah masa pemulihan. Hal ini berkat kebijakan pimpinan pusat DJPB yang memberikan diskresi (penyesuaian perhitungan) untuk beberapa target yang memang sangat terdampak akibat gempa. Dengan kondisi layanan yang masih terbatas, para *stakeholders* tetap merasa puas dan memberikan apresiasi positif kepada kantor yang pernah meraih predikat *runner up* Kantor Pelayanan Percontohan tingkat Kementerian Keuangan ini.

"Memang tidak bisa cepat, tapi kami yakin perbaikan sarana dan prasarana pendukung KPPN Palu bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Insha Allah, 2020 kami sudah bisa menempati gedung yang lebih representatif dan nyaman bagi para *stakeholders*," ucap Salim penuh harap menutup sesi wawancara dengan kami.

Teks Dimach Putra



Laku Lelaki Kimia

Pemeriksa pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Medan

Ditilik dari pakaian seragam sehari-hari, tak tampak banyak beda antara ia dan punggawa Bea dan Cukai yang lain. Kecuali saat ia sedang bertugas. Ia akan beralih rupa layaknya seorang kimiawan. Jas laboratorium, sarung tangan, serta masker yang terikat melindungi wajah. Adalah Muhammad Fahmi Arsyad, pemeriksa pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Medan. Ia tak bertugas di pintu masuk perbatasan, tak pula menyisir siapa datang bawa apa ke negeri ini, pun tak jua patroli berlayar berhari-hari di lautan Ibu Pertiwi. Hari ini bisa jadi ia bekerja bersama aneka rupa bejana. Esok, bukan mustahil ia bekerja bersama kotak-kotak detektor ramuan. Kali lain, mungkin saja ia akan bergelut bersama seember minyak sawit atau segerombolan plastik.

Segala Perkara Kimia

Sebagai pemeriksa di Balai Laboratorium Bea dan Cukai, pekerjaannya setiap hari adalah perkara pengujian barang dan



Pemeriksaan dan identifikasi barang

Foto
Anas Nur Huda

segala tetek bengeknya. Ia menerima permintaan pengujian dan identifikasi barang dari unit pelayanan Bea dan Cukai yang ada di wilayahnya. Usai pemeriksaan, ia akan merilis hasil uji dan identifikasi barang tersebut untuk kemudian dijadikan dasar klasifikasi bea masuk ataupun cukai. Selain permintaan dari KPPBC, Balai Laboratorium Bea dan Cukai juga menerima permintaan uji laboratorium dari pihak eksternal. Pihak ini meliputi badan usaha, perorangan, ataupun institusi pendidikan dengan tujuan akademik. Barang yang dapat dilakukan pengujian pun lintas segmen. Mulai barang hasil tambang, industri, sampai hasil perkebunan. Sekali waktu, Fahmi dan rekan-rekannya bahkan juga perlu menguji kandungan obat-obatan.

Tugas di laboratorium bukan perkara mudah, kendati gairah begitu luar biasa pada ranah kimia. Kini,

Balai Laboratorium Bea dan Cukai menerapkan waktu bekerja 24 jam dengan jadwal piket. Fahmi dan sejawat mesti bergiliran untuk berkutat dengan tetek bengek laboratorium sampai tengah malam. Ini dilakukan sebagai komitmen atas pelayanan pengujian dan identifikasi barang.

Sebelum didaulat mengabdikan dirinya di Medan, Fahmi pernah bertugas di Balai Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya. Tak banyak beda antara yang mesti dilakukan oleh pemeriksa laboratorium di masing-masing wilayah. Perbedaan paling kentara adalah dari jenis barang yang dilakukan pengujian. Di Medan, pengujian laboratorium didominasi oleh komoditas hasil perkebunan kelapa sawit. Sedangkan di Surabaya, menurut Fahmi, pengujian laboratorium lebih didominasi oleh produk-produk hasil tambang. Ia juga menambahkan, tak jarang ia harus menguji kandungan obat-obatan, lebih-lebih yang diduga golongan narkotika dan zat-zat terlarang.

Pengalaman Berharga

Suatu saat, Fahmi juga menemukan obat dengan kandungan yang identik dengan metamfetamin namun telah dimodifikasi sedemikian rupa. “Sebenarnya kandungannya sama, hanya struktur molekulnya beda. Sehingga dia tidak masuk golongan metamfetamin,” katanya pada Media Keuangan.

Fahmi lantas menceritakan pengalaman selama bertugas di Balai Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya. Saking kerapnya menguji obat-obatan, ia dan rekan-rekannya bahkan sampai bisa membedakan mana sabu-sabu buatan Belanda mana buatan negara lain kala itu. Sedangkan selama di Medan, ia justru lebih sering menguji produk kelapa sawit dan aneka turunannya. Kendati demikian, ia beberapa kali masih menguji obat-obatan yang ditengarai masuk golongan narkotika juga.

“Senang, Mas. Saya senang di lab,” katanya spontan kala ditanyai perihal perasaannya bekerja di laboratorium. Ia tersenyum dan tampak menikmati kesehariannya berkutat dengan perkara kimiawi. Fahmi juga berharap, kelak laboratorium Bea dan Cukai lebih berkembang dan memberikan dampak yang lebih baik bagi penerimaan dan keamanan negara.

Teks A. Wirananda

Perbaiki Ketentuan Ekspor untuk Gairahkan Industri Kelapa Sawit

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya

Industri kelapa sawit telah menjadi komoditas penghasil devisa terbesar di Indonesia. Berbagai tantangan dihadapi industri ini, antara lain fluktuasi harga yang semakin menurun, produksi yang semakin meningkat, dan isu lingkungan yang dikaitkan secara negatif terhadap keberadaan industri kelapa sawit. Pada tahun 2018 harga minyak mentah kelapa sawit//crude palm oil (CPO)

mengalami penurunan dengan harga rata-rata sebesar US\$595,5 per metrik ton, dibanding tahun 2017 sebesar US\$714,3 per metrik ton. Di tengah penurunan harga CPO, Indonesia masih bisa mencatat kenaikan ekspor minyak sawit sebesar 8%, dari 32,18 juta ton pada tahun 2017 menjadi 34,71 juta ton di tahun 2018.

Hingga saat ini isu lingkungan masih dihadapi industri kelapa sawit, terutama isu mengenai terbentuknya lahan perkebunan kelapa sawit sebagai hasil dari konversi kawasan hutan menjadi kawasan non hutan (deforestasi). Deforestasi selain dianggap sebagai sumber emisi green house gas (GHG), juga dinilai dapat mengancam keanekaragaman hayati. Dalam menghadapi isu ini, perusahaan kelapa sawit berbenah diri untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Indonesia juga telah melakukan berbagai kampanye dalam forum global untuk menghadapi kampanye negatif terkait isu lingkungan ini.

Sebagai respon untuk mempercepat layanan dan pengawasan kepabeanan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.04/2019 yang diundangkan pada 1 Maret 2019 dan berlaku tujuh hari setelah tanggal diundangkan, yakni 8 Maret 2019. PMK ini memuat 13 pasal dengan beberapa pengaturan, di antaranya mengenai kewenangan Ditjen Bea dan Cukai, pengenaan bea keluar dan pungutan, pemeriksaan fisik, dan laboratorium untuk uji laboratoris.

Percepat Pelayanan Ekspor

PMK Nomor 22/PMK.04/2019 ini diterbitkan

dengan beberapa tujuan. Pertama, dalam rangka meningkatkan akurasi data. Data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat digunakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) dalam pengawasan pembayaran dana pungutan, statistik data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemantauan Devisa Hasil Ekspor oleh Bank Indonesia. Akurasi data juga diperoleh dari kepastian jumlah dan jenis barang ekspor.

Tujuan kedua yaitu percepatan waktu pelayanan ekspor. Saat ini waktu pelayanan ekspor CPO dan produk turunannya adalah 124,4 jam atau 5,2 hari untuk produk CPO dalam kontainer. Adapun waktu customs clearance adalah selama 10,4 jam. Dengan aturan baru, diharapkan adanya percepatan waktu pelayanan ekspor menjadi 6 jam. Selain percepatan waktu, adanya efisiensi biaya karena pelayanan ekspor oleh DJBC tidak dipungut biaya. Tujuan selanjutnya adalah percepatan pengawasan kepabeanan di bidang ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya.

Kewenangan Bea dan Cukai

Sebagai wujud atas kemudahan proses, PMK 22/PMK.04/2019 menegaskan alur yang harus ditempuh eksportir sebelum menyampaikan PEB. Pertama, eksportir harus mengajukan permohonan pemuatan barang untuk ekspor dalam bentuk curah terhadap CPO dan produk turunannya. Kedua, pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan jumlah dan jenis barang. Pemeriksaan fisik yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai dapat dilakukan sebelum maupun sesudah PEB disampaikan. Permohonan pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB dapat dilakukan untuk produk dalam bentuk bukan curah.

Apabila tidak mengajukan

permohonan pemeriksaan fisik, eksportir harus mengajukan PEB kepada Kepala Kantor Pabean dengan dokumen invoice, packing list, dan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh laboratorium DJBC dan laboratorium lain yang telah didaftarkan di kantor pabean oleh eksportir. Terdapat pengecualian aturan pengenaan pemeriksaan fisik, yaitu bagi eksportir yang tergolong *Authorized Economic Operator* (AEO) bebas dari pemeriksaan fisik, namun tetap harus menyampaikan hasil pengujian laboratorium DJBC atau laboratorium lain yang telah didaftarkan di Kantor Pabean oleh eksportir.

Kewenangan lain dari DJBC yaitu memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan daftar laboratorium dalam rangka pengujian laboratoris. Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pabean disertai dokumen sertifikat akreditasi dan standar metode persetujuan.

Bea Keluar dan Pungutan

Eksportir wajib untuk memenuhi dokumen dan administrasi dalam menyampaikan PEB agar proses dapat berjalan sesuai dengan target. Dokumen yang wajib diselesaikan antara lain kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan yang berlaku. PEB hanya dapat dilayani setelah eksportir memenuhi kewajiban pembayaran tersebut.

Penetapan kembali perhitungan bea keluar dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak PEB mendapat nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan mengenai pemungutan bea keluar. Aturan pungutan dana perkebunan dan bea keluar diterapkan dengan ketentuan apabila harga referensi CPO tidak lebih dari US\$750, maka hanya dipungut dana perkebunan. Sebaliknya, apabila harga referensi CPO

lebih dari US\$750/ton, maka dipungut dana perkebunan dan bea keluar. Harga Referensi CPO mulai periode bulan Mei 2017 s.d. Desember 2018 selalu berada di bawah threshold USD 750, sehingga tarif Bea Keluar yang digunakan untuk kelapa sawit, CPO dan produk turunannya serta produk campuran dari CPO dan produk-produk turunannya adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 1 Lampiran II huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk CPO dikenakan tarif Bea Keluar sebesar USD 0/MT.

Penutup

Sejalan dengan berlakunya PMK Nomor 22/PMK.04/2019, maka untuk mempermudah layanan ekspor yang berdampak kepada peningkatan ekspor industri kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang menambah insentif bagi eksportir produk tersebut. Pemerintah membebaskan eksportir komoditas ini dari pungutan BPDP KS, dimana sebelumnya Pemerintah membebaskan eksportir dari kewajiban bea keluar. Ketentuan dimaksud diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP KS pada Kementerian Keuangan, yang berlaku pada 11 Maret 2019.

Teks Budi Sulistyio

Ilustrasi
A. Wirananda



Sang Visioner Pembiayaan Mikro

Andi Taufan Garuda saat kelulusannya dari program Master of Public Administration di Harvard University.

Andi Taufan bersama pengusaha mikro yang mendapat bantuan pembiayaan dari Amarta Finance.

Foto Dok. Pribadi

Tidak banyak pemuda yang berani terjun langsung membangun ekonomi desa dengan memberikan pembiayaan bagi para pengusaha mikro. Lebih jarang lagi, jika sarannya adalah para ibu rumah tangga, kelompok masyarakat yang sering termarginalkan. Dialah Andi Taufan Garuda *pioneer* pembiayaan bagi usaha mikro di daerah.

Melalui Amarth Finance, Andi memberikan modal pembiayaan bagi para pengusaha mikro, terutama kaum ibu di desa-desa. Kini, Amarth Finance yang dia dirikan telah menjangkau lebih dari 200 ribu pengusaha mikro yang tersebar di 5.000 desa di Indonesia. Adapun total dana yang disalurkan mencapai Rp900 miliar lebih sejak awal mula didirikan.

Bagi Andi, bekerja bukan sekadar berkari, melainkan bagaimana agar pekerjaan yang digeluti bisa memberikan makna untuk bangsa. Saat banyak orang tergiur dengan kemapanan dalam bekerja, Andi justru melepaskan kariernya sebagai konsultan bisnis di International Business Machines (IBM) Corporation pada sepuluh tahun silam. “Banyak hal yang bisa saya *explore* dan kerjakan (di luar IBM),”akunya.

Berhenti untuk melompat lebih tinggi

Selama dua tahun berkari di IBM Corporation, Andi beberapa kali ditugaskan ke sejumlah daerah. Pada momen tersebut, lulusan sarjana manajemen bisnis di Institut Teknologi Bandung ini menyaksikan secara langsung bagaimana ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Andi gelisah. Dia ingin terlibat langsung untuk membantu masyarakat di daerah agar lebih mapan secara ekonomi. Lewat perbincangan ringan bersama masyarakat, keterbatasan modal selalu jadi kendala utama, mengapa ekonomi masyarakat di daerah sulit berkembang. Dari sini, ide untuk membangun perusahaan yang bergerak di bidang keuangan mikro (*microfinance*) bermula.

Andi mendirikan Amarth Finance pada 2010. Diakui Andi, tujuan didirikannya Amarth Finance adalah untuk menjawab pertanyaan sederhana tentang bagaimana pengusaha mikro di desa bisa memperoleh permodalan terjangkau. “Dari sana saya belajar, ternyata memberikan akses permodalan (kepada masyarakat) memiliki *impact* yang sangat besar bila dijalankan dengan profesional,”ungkapnya.

Lebih jauh Andi mengungkapkan,

menghadirkan akses permodalan bagi pengusaha mikro, ternyata tidak hanya memberikan kesempatan bisnis untuk tumbuh, tetapi juga mendorong masyarakat agar bisa hidup sejahtera dan mampu melompat ke atas garis kemiskinan. Ke depan, Andi berharap Amarth Finance bisa berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi masyarakat, (solusi terhadap) pengentasan kemiskinan, dan menjembatani pemerataan ekonomi di daerah-daerah pelosok Indonesia.

Belajar lagi

Lima tahun mengelola Amarth Finance, Andi memutuskan untuk melanjutkan pendidikan pada 2015. Kebutuhan untuk mendalami ilmu sebagai bekal untuk memimpin Amarth begitu kuat dia rasakan. Beruntung, Andi memperoleh informasi mengenai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Melalui beasiswa dari LPDP, Andi melanjutkan pendidikan bidang Master of Public Administration di universitas ternama dunia, Harvard University.

“Pada tahun saya mendaftar (yaitu) 2015, tidak banyak kesempatan beasiswa yang disampaikan ke publik luas. Sepemahaman saya pada waktu itu, hanya LPDP yang memungkinkan untuk memberikan beasiswa berdasarkan sekolah yang saya pilih,” kenangnya.

Serangkaian tes dijalankan Andi dalam seleksi LPDP. Dia menilai, rangkaian tes tersebut bertujuan untuk menguji potensi *leadership* para calon *awardee*, sekaligus komitmen mereka untuk berbakti kepada negara di masa mendatang.

Kepada Media Keuangan, Andi menyampaikan kunci utama agar lulus seleksi. “Banyak orang berpikir (untuk) mempersiapkan diri (dalam seleksi beasiswa) jangka waktunya hanya 3-6 bulan sebelum tes. Padahal menurut saya, untuk memperoleh beasiswa, yang utama dilihat adalah perjalanan karier kita, sehingga waktu yang perlu disiapkan



bahkan 2-3 tahun sebelumnya,” terang Penerima Ashoka Young Change Makers Award pada 2010 ini.

Lebih jauh Andi menyampaikan, perjalanan karier sebelumnya bisa menjadi nilai lebih saat menjalani seleksi “Bagaimana kita memberikan yang terbaik di tempat kerja, bagaimana kita mengukur dampak dari pekerjaan kita, hingga kesempatan untuk memperoleh apresiasi terhadap apa yang kita berikan untuk negeri,” ujarnya.

Tidak mudah mengelola perusahaan sambil belajar. Terlebih lagi, dua kewajiban utamanya tersebut perlu dilakukan di dua tempat berbeda. Andi perlu pandai-pandai membagi waktu agar keduanya bisa berjalan beriringan. “Di (waktu) pagi-sore belajar dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Di (waktu) malam-pagi *concall* dengan tim Amarth di Indonesia untuk membantu mengarahkan tim,” kenangnya. Diakui Andi, pada saat itu Amarth Finance berada pada masa krusial karena kekosongan pemimpin, serta dalam proses transformasi sebagai perusahaan *financial technology* (fintech).

Lonjakan usaha

Lulus kuliah master di Harvard University, Andi Taufan mentransformasi Amarth dari lembaga keuangan mikro konvensional menjadi *peer to peer lending*. Transformasi ini membuka kesempatan bagi individu maupun kelompok untuk terhubung dan berinvestasi dengan pengusaha mikro di pedesaan yang mencari pinjaman modal. Amarth juga mengembangkan *credit scoring system*

dengan pendekatan *machine learning* yang memungkinkan untuk menilai kelayakan setiap peminjaman.

Diakui Andi, total dana yang disalurkan hingga kini mencapai Rp900 miliar. Dari jumlah tersebut, 80 persennya terjadi setelah dirinya merampungkan kuliah masternya. “Kami akan terus tumbuh menjangkau lebih banyak mitra pengusaha mikro terutama yang berada di daerah Indonesia Timur. *One village at a time*,” harapnya.

Berburu beasiswa

Kepada para pemburu beasiswa, Andi berpesan agar mematok target untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi di sekolah terbaik. “Jangan setengah-tengah mengejar cita-cita. Persiapkan diri dua hingga tiga tahun sebelum mendaftar sekolah. (Hal ini berguna) untuk membangun story dan *impacts* yang ingin diceritakan pada saat mendaftar sekolah,” pesan peraih Ten Outstanding Young Person Indonesia (TOYP) 2014 dari the Junior Chamber International pada April 2014 ini.

Lebih jauh, Andi berharap agar LPDP ke depan dapat mendesain program khusus untuk *Merit-based scholarship* bagi 20 universitas teratas dunia. “(Sebab) proses untuk masuk ke top 20 *universities in the world* sudah sangat kompetitif. (Maka) mendorong jumlah mahasiswa Indonesia di top 20 *universities* sangat penting untuk meningkatkan *competitive value* Indonesia dibandingkan dengan China, India, dan Negara-negara Afrika,” tutupnya.

Teks Farida Rosadi

BARANG BAWAAN PENUMPANG



PEMBEBASAN

BEA MASUK DAN PAJAK IMPOR

FOB **500** USD

PER ORANG

INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI



www.beacukai.go.id

   @beacukaiRI



 Bugar

Foto
Resha Aditya
Ilustrasi
A. Wirananda

Karies Gigi Picu Endocarditis

Drg. Siska Maya
(Balai Kesehatan Kementerian Keuangan)

Gigi berfungsi sebagai jalan pertama makanan masuk ke dalam tubuh. Kadang kala kita menganggapnya remeh sehingga tidak merawatnya dengan baik. Tanpa sadar, masalah gigi muncul, lalu lama kelamaan berkembang menjadi hal serius.

Terdapat hubungan erat antara kesehatan gigi dan mulut dengan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Terlebih jika terjadi infeksi, misalnya berupa karies gigi. Penyakit yang diawali dengan infeksi ini dapat merusak struktur gigi sampai gigi berlubang. Karies gigi harus segera diobati oleh dokter gigi. Jika terus dibiarkan, hal serius dapat timbul pada akar gigi hingga terbentuk kista di dalam gusi. Bermula dari karies gigi, seseorang dapat merasakan nyeri, gigi tanggal,

dan demam. Pada kasus tertentu, karies gigi bahkan menyebabkan kematian.

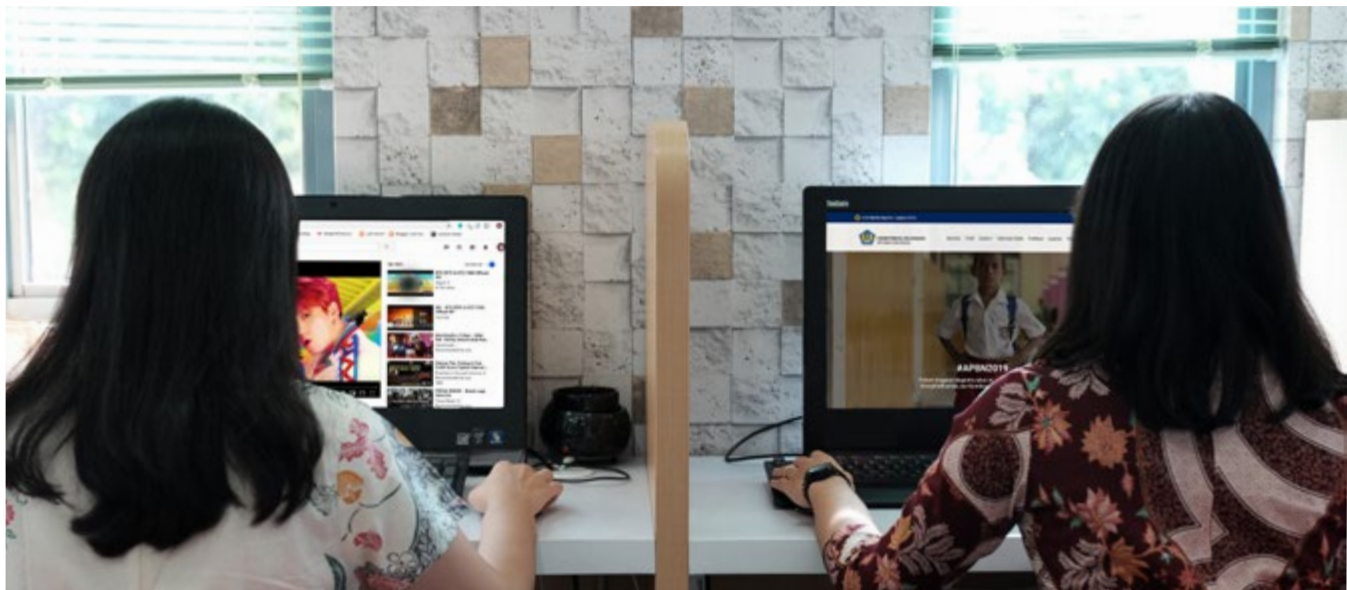
Karies gigi dapat menjadi pemicu masalah jantung. Kuman dari karies gigi masuk ke dalam aliran darah, berakhir di jantung, lalu menimbulkan persoalan pada lapisan dalam jantung (*endocardium*) berupa *endocarditis*. Dalam jangka waktu tertentu, seiring menumpuknya infeksi gigi akibat karies gigi yang tidak ditangani, *endocarditis* akan menimbulkan masalah pada katup jantung hingga berbagai komplikasi berbahaya.

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar, kondisi kesehatan gigi masyarakat Indonesia cenderung tidak baik. Survei yang melibatkan 2.132 dokter gigi ini mencatat 57,6 persen penduduk Indonesia mengakui mengalami

masalah gigi dan mulut dan hanya 10,2 persen yang mendapat penanganan medis gigi. Sementara itu, data World Health Organization tahun 2012 menunjukkan 17,5 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler atau 31 persen dari 56,5 juta kematian di seluruh dunia. Lebih dari 3/4 kematian akibat penyakit kardiovaskuler terjadi di negara berkembang yang berpenghasilan rendah hingga sedang. Dari hasil penelitian lainnya didapat data bahwa dari sejumlah kasus penyakit jantung, sebanyak 54% pasien memiliki riwayat penyakit gigi berlubang. Begitu mendalam dampak yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindak pencegahan yang adekuat terhadap karies gigi.

Pencegahan utama karies gigi adalah dengan menggosok gigi teratur setiap setelah makan dan sebelum tidur. Untuk mengurangi risiko terbentuknya plak gigi, kurangi konsumsi makanan manis atau mengandung gula. Penggunaan pasta gigi mengandung *flour* juga dapat melindungi gigi dari karies. Lalu, untuk mencapai kesehatan gigi dan mulut optimal, lakukan perawatan gigi dan mulut secara berkala ke dokter gigi minimal enam bulan sekali.

Agar Hidup Tak Sekadar Hidup



Menginjak usia dewasa, seseorang mungkin bertanya-tanya tentang tujuan hidup, pencapaian, dan apa yang ingin dikejar. Dalam satu hari, setiap orang sama-sama memiliki jatah waktu 24 jam. Namun, mengapa pencapaian satu orang bisa berbeda dengan yang lainnya? Mengapa di usia yang sama, ada yang telah berhasil meraih berbagai prestasi membanggakan, ada pula yang masih menjadi ‘penonton’ dalam siklus kehidupan?

Setiap manusia unik dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Manusia lahir dengan dianugerahi berbagai potensi sesuai porsinya masing-masing. Sungguh sayang bagi mereka yang melewati hari, tanpa upaya mengembangkan potensi dalam dirinya. Bahkan, tidak mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai.

Hidup tanpa tujuan membuat

seseorang kehilangan arah. Seseorang yang tanpa tujuan, tanpa target, dan tanpa tahu hal apa yang harus ia lakukan, akan terjebak pada rutinitas. Celakanya, tabiat manusia cenderung kepada hal-hal negatif saat tidak ada kesibukan yang ditekuni. Tidak jarang, kita dapati seseorang bermain *smartphone* hingga lupa waktu, bahkan melalaikan kewajibannya. Masalahnya, kebanyakan dari kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Salah satu sebabnya karena tidak memiliki tujuan hidup sehingga berakhir dengan konsep ‘biarkan hidup mengalir sebagaimana air.’

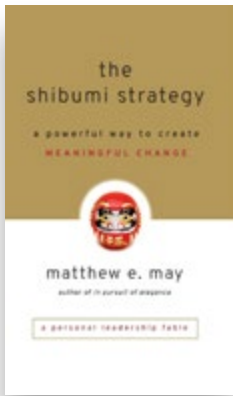
Itu sebabnya, seseorang perlu memiliki konsep hidup. Konsep ini akan memandu setiap orang untuk menjalani hari demi hari. Konsep ini tentu saja dibuat sendiri karena setiap diri paling memahami tentang apa yang diperlukan, serta metode apa yang paling nyaman digunakan dalam

mencapai tujuan. Dengan demikian, setiap waktu luang yang tersedia diisi dengan segala hal yang bisa mendekatkannya pada tujuan.

Selanjutnya, apakah kunci keberhasilan cukup sampai di situ? Jawabnya, tidak. Dua orang dengan tujuan dan konsep hidup yang sama, bisa memiliki hasil pencapaian yang berbeda. Kuncinya terletak pada komitmen dalam menjalankan aturan dan segala hal yang telah dibuat. Sebagaimana orang bijak menyebutkan bahwa kunci keberhasilan adalah “*Ciptakan rutinitas sederhana, lalu pertahankan.*” Artinya, perlu sikap konsisten dalam menjalankan setiap hal baik yang telah dikonsepskan sebelumnya.

Jadi, sudahkah Anda membuat tujuan dan konsep hidup, lalu berkomitmen menjalankannya?

Teks Rahma Aziza Fitriana



Judul:
The Shibumi Strategy: A Powerful Way to Create Meaningful Change
Editor:
Matthew E. May
Tahun terbit:
2011 (terbitan pertama)
Dimensi:
162 Halaman

Buku ini dapat dibaca di:



Buku Pilihan Perpustakaan Kementerian Keuangan RI:

Sapiens

Yuval Noah Hariri

Hujan Bulan Juni

Sapardi Djoko Damono

The Shibumi Strategy: A Powerful Way to Create Meaningful Change

Matthew E. May

Everybody Lies: Big Data dan Apa yang Diungkapkan Internet tentang Siapa Kita Sesungguhnya

Seth Stephens-Davidowitz

Nilai Skor TPA 780 Oto Bappenas

Muhammad Amien

Kunjungi Perpustakaan Kemeznterian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

 Perpustakaan Kemenkeu

 Perpustakaan Kementerian Keuangan

 @kemenkeulib

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

Refleksi Perbaiki Diri

Banyak di antara kita pasti pernah merasa bosan dengan kehidupan yang dijalani saat ini. Atau, tebersit dalam pikiran bahwa mungkin selama ini kita telah terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa perbaikan dan kemajuan? Sadar atau tidak, selama ini kita terperangkap dalam zona nyaman hingga melewatkan begitu banyak kesempatan untuk berubah yang berdampak nyata bagi kehidupan kita. Sering juga kita dihadapkan pada situasi kritis, di mana sebuah keputusan harus diambil sebagai penentu langkah selanjutnya. Apapun kondisi hidup kita saat ini, membaca buku ini bisa jadi salah satu inspirasi memulai langkah transformaasi dalam kehidupan kita untuk meraih tujuan yang ingin dicapai.

Shibumi adalah sebuah konsep yang terinspirasi dari prinsip *Zen Buddhism* dan akan menuntun kita untuk sejenak melakukan refleksi diri atas apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Hal ini bisa diadopsi sebagai salah satu cara untuk memulai perubahan dalam hidup kita. Matthew, sang penulis, dalam bukunya ini menyampaikan konsep *shibumi* lewat cerita fiksi sederhana dengan tokoh utama Andy Harmon yang berhasil melalui salah satu fase transisi penting dalam kehidupan profesionalnya setelah mempraktikkan teknik ini.

Buku ini mengajak kita untuk menyelami proses terjadinya sebuah

perubahan penting dalam kehidupan seseorang melalui 5 tahapan, yaitu: komitmen, persiapan, perjuangan, terobosan, dan transformasi. Hal menarik saat membaca buku ini adalah kita akan menjumpai penggunaan berbagai istilah baru dalam bahasa Jepang yang erat kaitannya dengan praktik *shibumi*, seperti *genchi genbutsu* (observasi), *hoshin* (penyelarasan tujuan), *kaizen* (perbaikan terus menerus), dan *hansei* (introspeksi diri). Di akhir buku ini kita juga akan mendapati daftar pertanyaan yang dapat digunakan sebagai *trigger* bagi kita dalam melalui setiap tahapan menuju *shibumi*, yaitu saat kita berhasil membuat sebuah *breakthrough* dalam hidup kita, saat kita berani memulai sesuatu yang baru dengan perspektif yang berbeda.

Ditulis dengan gaya cerita dan pilihan kata yang mudah dipahami, pesan pembelajaran dari buku ini berlaku secara universal sehingga setiap pembaca dapat memaknainya serta merefleksikannya sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi. Tidak berlebihan rasanya jika kita menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk sejenak ‘berkaca’ lewat buku ini dan menghidupkan kembali semangat untuk memulai langkah menuju perubahan yang kita tuju.

Peresensi Slamet Riyadi

Kertha Gosa, Pengadilan di Zaman Kerajaan Bali

“Tamunya dari negara mana?”, tanya sang penjaga loket. Saya kebingungan. Gelagapan, patah-patah saya membalas bahwa tamunya adalah saya sendiri.

Si penjaga loket mengangkat mukanya. “Oh, tiyang kira! *Saking napi* (Saya kira! Dari mana)?”

“Jakarta,” jawab saya sambil tersenyum.

Masalah besar bagi semua tempat wisata sejarah di Bali, termasuk di dalamnya taman yang akan saya kunjungi ini, adalah tempat tersebut tidak kerap dikunjungi oleh wisatawan domestik. Pengunjung tetapnya, sejauh mata memandang, adalah wisatawan asing, para bule dengan pemandu lokal yang berpakaian adat seperti saya. Saya mulai paham mengapa si penjaga loket salah paham mengira saya sebagai *guide*.

Padaahal tiket masuknya tidak demikian mahal. Dua puluh lima ribu rupiah untuk turis lokal, dua kali lipatnya untuk turis asing.

Inilah Kertha Gosa. Satu paviliun yang ada di kompleks istana Kerajaan Klungkung. Kerajaan ini merupakan kerajaan Bali yang acap disebut sebagai kerajaan tertua, karena garis keturunannya bisa dibilang lebih dekat dengan Kerajaan

Majapahit di Jawa Timur. Klungkung sendiri merupakan kerajaan terakhir yang berhasil dikuasai Belanda; ia masih merdeka sampai tahun 1908.

Taman Kertha Gosa dibangun pada akhir abad ke-18, difungsikan sebagai tempat musyawarah raja dengan para pendeta tinggi untuk memutuskan kasus hukum. Konon, kasus-kasus yang tidak berhasil diputus di pengadilan adat desa seluruh Bali dibawa ke hadapan sidang ini guna mendapat putusan. Putusan sidang dewan ini adalah putusan akhir: ia bersifat final, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap.

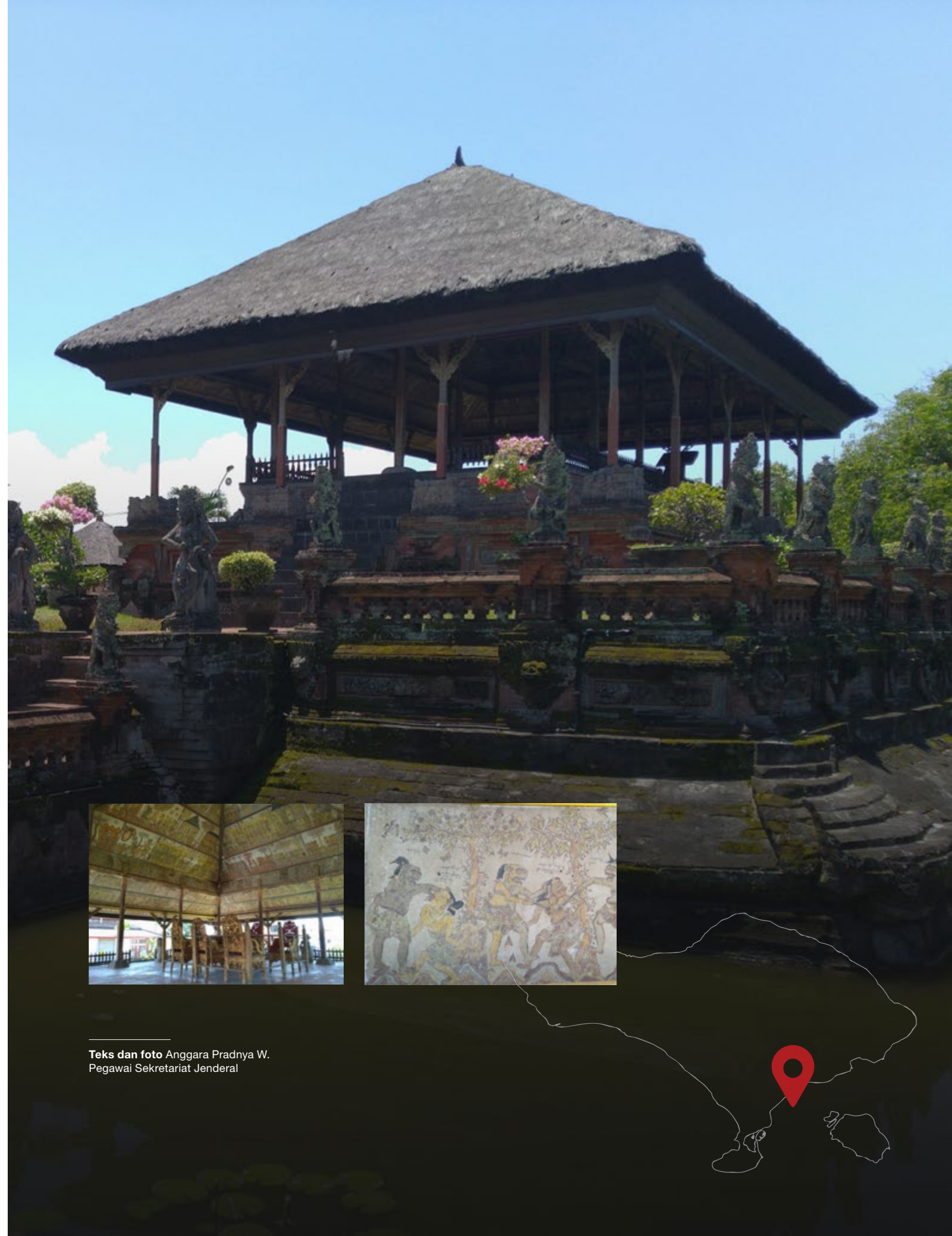
Kertha Gosa terletak di jantung kota Semarapura, ibu kota Kabupaten Klungkung. Dengan sepeda motor, tempat ini dapat dicapai sekitar satu jam dari Kota Denpasar. Tempat ini tidak susah untuk ditemukan, karena ia tepat berada di *catuspata*—pusat garis-garis imajiner kota yang ditandai perempatan besar dengan patung *catur muka*.

Objek wisata ini menjadi terkenal karena lukisan langit-langitnya yang tiada dua. Lukisan langit-langit bergaya Kamasan (salah satu desa di Kabupaten Klungkung yang terkenal dengan seni lukisnya) menggambarkan satu bagian dari kisah Mahabharata, bertajuk Bhima Swarga. Kisah ini menceritakan perjalanan Bima, salah satu anggota Pandawa Lima,

menyelamatkan Pandu (ayahnya) dan Dewi Madri (istri kedua Pandu) dari siksa api neraka, dan menempatkannya ke surga. Ditampilkan juga keadaan neraka, beserta apa yang terjadi pada mereka yang dihukum di sana.

Uniknya, penempatan lukisan di langit-langit paviliun ini agaknya menerapkan aturan tidak tertulis sejak zaman pembangunan candi di Jawa yaitu soal di mana suatu gambar tokoh boleh ditempatkan. Gambaran penyiksaan neraka, dengan tokoh-tokoh vulgar dan telanjang, beserta penjaga neraka yang bertampang bengis nan seram ditempatkan di bagian bawah. Sementara itu, tokoh utama dan tokoh-tokoh suci ditempatkan di bagian atas. Pada puncak langit-langit, terdapat hiasan teratai yang dikelilingi empat burung di tiap sudutnya.

Akhirnya, sebuah meja dan enam kursi menjadi peninggalan dari dewan agung. Lengan kursi yang berhiaskan pahatan kepala binatang menandai tempat duduk raja, pendeta, atau pejabat kerajaan. Sementara itu, para pesakitan—jika cukup beruntung menyaksikan sidang dan menunggu hukuman mereka—duduk di langkan sempit di luar pagar kayu pada pinggir balai, dengan pemandangan lukisan neraka sebagai satu-satunya hal yang dapat mereka lihat.



Teks dan foto Anggara Pradnya W.
Pegawai Sekretariat Jenderal



Mengatur Keuangan Akhir Bulan



Karyawan atau pekerja lepas memiliki siklus bulanan mulai dari tanggal memperoleh gaji sampai uang habis dan mendapatkan gaji lagi. Cara mengatur keuangan setiap individu pun berbeda-beda pula, tergantung *lifestyle* mereka. Ironisnya ketika orang sudah paham siklus tadi, masih ada saja titik nadir keuangan yang orang sebut dengan “*tanggal tua*”.

Mengatur keuangan di tanggal tua memang terkadang tricky. Niat hati ingin berhemat, apa daya banyak godaan. “*Baru jalan lima hari, rekening tinggal dua jutaan. Masih ada 25 hari lagi sisa penderitaan yang harus dialami.*”

Pernahkah Anda mengalami nasib yang sama? Biasanya sebagian besar orang yang mengalami defisit uang terlalu cepat dari kewajaran disebabkan oleh faktor utang. Oleh karena itu, utang adalah salah satu yang harus dihindari sebisa mungkin untuk tujuan konsumtif. Dengan begitu, roda penderitaan akhir bulan menjadi lebih mudah teratasi.

Biaya hidup yang sudah dialokasikan bulanan juga harus benar-benar dihitung. Misalnya, 50 persen dari total pemasukan bulanan perlu Anda usahakan cukup menjadi uang bulanan. Wajar saja jika lima hari terakhir masuk kategori waktu “menderita” bila uang bulanan tak

dialokasikan dengan tepat.

Yang kedua, kunci mengatur keuangan yang paling vital memang di anggaran. Kalau Anda merencanakannya secara efektif, dapat dipastikan akan aman. Begitu pula sebaliknya. Apabila Anda merasa gajinya sangat sedikit dan kadang sering lupa bahwa sebulan ada 30 hari, saya menyarankan untuk mencoba teknik 20:10.

Untuk mengoptimalkan pengeluaran, silakan Anda coba membagi uang belanja menjadi dua rekening. Bagian pertama masukkan ke rekening A untuk pengeluaran 20 hari pertama. Dana kedua untuk 10 hari sisanya dapat Anda masukkan ke rekening B. Buku rekening B beserta ATM dan pin dapat Anda simpan di rumah. Jangan dibawa kemana-mana dan hanya boleh digunakan mulai tanggal 21.

Selanjutnya adalah dana darurat dan dana cadangan. Nominalnya kecil, tapi harus ada di rekening atau instrumen investasi lain. Untuk dana darurat dan dana cadangan yang berbentuk investasi disarankan mencari produk yang paling *liquid*. Artinya, dana tersebut mudah dicairkan ketika Anda membutuhkan segera, seperti emas, saham, dan lainnya. Saham bisa menjadi dana darurat? Bisa. Namun demikian, instrumen yang paling

ideal memang berbentuk kas di rekening karena pencairan saham lebih dari satu hari.

Keempat, adapula teknik yang kelihatannya ribet, namun implementasinya sebenarnya mudah. Teknik ini sebenarnya sudah diajarkan oleh orang tua saat kita bersekolah dalam bentuk uang saku setiap hari. Dengan besaran yang berbeda, kita juga bisa mengimplementasikan teknik ini. Misalnya, dengan alokasi pengeluaran sebulan sekitar Rp 3 juta, maka kita bisa membaginya dengan 30 hari. Hasilnya sehari Rp100 ribu. Jadi, Anda mempunyai jatah maksimal uang untuk dihabiskan sebesar Rp100 ribu per harinya.

Terakhir, beberapa orang memang memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengatur keuangannya. Namun salah satu kesalahan fatal adalah ketika membelanjakan bonus atau penghasilan lain di luar pekerjaan utama secara langsung. Saran saya, masukan penghasilan tersebut ke tabungan utama, lalu Anda putuskan untuk dialokasikan ke dalam dana cadangan atau ke pos investasi lainnya.

Andhika Diskartes,
Perencana Keuangan, founder *diskartes.com*, dan penulis buku *Investory* dan buku *Investory “X”*.

Mas Praim

“PERTEMANAN (KURANG) SEHAT”

Cerita : Dimach Putra Gambar : Bimo Adi





MEMPERINGATI HARI BUKU SEDUNIA
23 APRIL 2019



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA